



EDUKASI KONSUMEN

DESEMBER 2021

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID



MENYONGSONG PRESIDENSI INDONESIA PADA G20



**VIDEO JINGLE
FINTECH
PENDANAAN
BERSAMA**



**VIDEO JINGLE
CAMILAN
(CAMERA,
MICROPHONE,
LOCATION)**

**Cek
videonya
di**

Scan me!



**Dewan Pelindung:**

Wimboh Santoso (Ketua Dewan
Komisioner OJK)

Dewan Penasehat:

Tirta Segara (Anggota Dewan Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan
Konsumen),

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Sarjito

(Deputi Komisioner Edukasi dan
Perlindungan Konsumen)

Redaktur Ahli:

Kristianti Puji Rahayu (Kepala
Departemen Literasi dan Inklusi
Keuangan), Agus Fajri Zam (Kepala
Departemen Perlindungan Konsumen),
Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi
dan Edukasi Keuangan), Rela Ginting
(Direktur Penelitian Kebijakan dan
Pengaturan EPK), Edwin Nurhadi
(Direktur Pengembangan Inklusi
Keuangan), Bernard Widjaja (Direktur
Market Conduct), Sabar Wahyono
(Direktur Pelayanan Konsumen), Tri
Herdianto (Direktur Pembelaan Hukum
Perlindungan Konsumen)

Redaktur:

Yulianta (Deputi Direktur Literasi dan
Informasi)

Redaksi:

Anggota Tim Direktorat Literasi dan
Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi &
Perlindungan Konsumen OJK Menara
Radius Prawiro Lantai 2, Komplek
Perkantoran Bank Indonesia,
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
10350

Telepon: (021) 29600000

Faksimili: (021) 3866032

Website: www.ojk.go.id.

Majalah Edukasi Konsumen dapat
diunduh pada minisite OJK:
sikapiuangmu.ojk.go.id

Redaksi menerima kiriman naskah
dan berhak mengedit naskah tanpa
menghilangkan intisari dari artikel
sebelum dipublikasikan

Sinergi OJK dalam G20 dan Pemulihan Ekonomi 2022

Indonesia resmi memegang posisi strategis Keketuaan atau
Presidensi *Group of Twenty* (G20) per 1 Desember 2021.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, bahwa dalam Presidensi G20
tersebut, Indonesia akan fokus untuk mengerjakan tiga hal, yakni
penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital,
dan transisi menuju energi berkelanjutan.

G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan
representasi dari 85% perekonomian dunia, 75% perdagangan
internasional, 60% populasi dunia, dan 80% investasi global.

Sebagai pemegang presidensi, Indonesia berperan mendorong
negara-negara G20 untuk melakukan sejumlah aksi nyata dan
terobosan besar pada 2022, terutama dalam ajang Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali

Terkait perbaikan perekonomian, Indonesia membawa isu-isu
prioritas, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan yang inklusif,
serta transformasi ekonomi berbasis digital.

Menyambut pemulihan ekonomi pada 2022, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) juga sudah menyiapkan delapan kebijakan strategis
dengan terus mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan bagi
masyarakat.

Delapan arah strategis kebijakan OJK 2022 tersebut yaitu:

1. Mengantisipasi dampak risiko *cliff effect* dari normalisasi
kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19;
2. Mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi
risiko perubahan iklim;
3. Mendorong percepatan transformasi ekonomi digital;
4. Meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan
perlindungan konsumen;
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan
sektor jasa keuangan syariah;
6. Melanjutkan inisiatif perubahan proses bisnis pengawasan dari
traditional *approach* ke arah pengawasan sektor jasa keuangan
terintegrasi berbasis teknologi informasi;
7. Melakukan percepatan reformasi pengawasan Industri Keuangan
Non Bank (IKNB);
8. Mengembangkan organisasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk menerapkan kebijakan strategis pada tahun depan,
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dalam Rapat Kerja
Strategis OJK 2022 menegaskan pentingnya bersinergi dengan
berbagai pihak.

Tujuannya agar OJK dapat memberikan manfaat dan kontribusi
yang lebih luas kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Penguatan sinergi dan koordinasi dengan para *stakeholders* juga
berkaitan dengan dukungan OJK terhadap pelaksanaan Presidensi
G20 Indonesia pada 2022.

“OJK mendukung pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun
2022 melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan,” tegasnya. ●

DAFTAR ISI DESEMBER 2021



- 3 **SALAM REDAKSI**
- 5 **SAJIAN UTAMA**
 - Presidensi G20: “*Recover Together, Recover Stronger*”
 - OJK Siapkan Delapan Arah Kebijakan Strategis Tahun 2022
- 11 **PERSPEKTIF**
 - Insentif dan Program Pemerintah Bangkitkan Industri Keuangan 2022
 - Buku Literasi Keuangan, Bekal bagi Calon Pengantin
- 14 **PASAR MODAL KITA**
 - Pasar Modal Indonesia, Makin Semangat Tembus Rekor Tertinggi
- 16 **PERBANKAN KITA**
 - Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan
- 18 **IKNB KITA**
 - Pembiayaan Berbasis Lingkungan Turut Serta Mendorong UMKM
 - Digitalisasi Pembiayaan untuk UMKM
- 20 **EDUINVEST**
 - World Investor Week 2021: Upaya OJK Tingkatkan Edukasi Investor Pasar Modal
 - Pilih Dana Darurat, Asuransi, atau Investasi?
- 22 **EDUIKNB**
 - Pembiayaan Nikah Lewat Pembiayaan Multiguna
- 23 **EDUTEK**
 - Perkembangan Regulasi Robot *Trading* di Pasar Saham
- 24 **EDUSYARIAH**
 - iB Vaganza 2021: OJK Perluas Edukasi Keuangan Syariah

- Wakaf Saham: Investasi sekaligus Ibadah dan Berbagi
- 26 **INFOGRAPHIA**
 - Inovasi Digital Sektor Keuangan
 - 8 Jurusan OJK Dukung UMKM Bangkit dari Pandemi
- 28 **OJK MENYAPA**
 - Meriahkan HUT Ke-10, OJK Berbagi Ilmu Lewat Kegiatan OJK Mengajar
 - OJK Gencar Edukasi dan Literasi Keuangan, Sasar UMKM hingga Petani
- 30 **PELUANG BISNIS**
 - Kampus UMKM Bersama, Bangkitkan Usaha Rakyat
 - Fenomena Kampung Youtuber di Bondowoso, Jawa Timur
- 32 **WASPADA INVESTASI**
 - Awas Investasi Bodong! Simak Ciri-Ciri Surat Izin Palsu Mengatasnamakan OJK

49

KABAR OTORITAS

Bulan Inklusi Keuangan 2021 Hadir Kembali, Kejar Target Inklusi Keuangan 2024

- Waspada Investasi Bodong Berkedok Robot *Trading*
- 34 **TELAAH PRODUK**
 - Kenali Perbedaan Pinjaman di *Fintech* P2P *Lending* dan BPR
- 36 **KONSUMEN BICARA**
 - Layanan Pengaduan Konsumen Kontak 157 selama 2021
- 38 **ANGKA BICARA**
 - Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, Ekonomi Bergerak Pulih
- 39 **INSPIRASI**
 - Direktur Utama Bank Jago, Kharim Indra Gupta Siregar: Fokus pada *Problem Solving*
- 41 **TOKOH**
 - CEO Bizhare Heinrich Vincent: Ajak Masyarakat Menuju *Financial Freedom*
- 42 **TAHUKAH ANDA**
 - Segera Ganti! Kartu Kredit dan Debit Harus Menggunakan *Chip*
 - Pentingnya Mempersiapkan Dana Pensiun sejak Dini
 - ESG dan Indeks SRI KEHATI: Alternatif Indikator Investasi yang Ramah Lingkungan
- 45 **ARTIKEL**
 - Waspada Modus Transaksi Kejahatan melalui e-*Wallet*/ Dompet Elektronik
 - Resolusi Finansial 2022: Atur Keuangan Lebih Baik
- 48 **KABAR OTORITAS**
 - Kolaborasi dengan OECD, OJK Selenggarakan Seminar Internasional Pengembangan Literasi Keuangan Digital
 - Ikut Percepat Pemulihan Ekonomi, OJK Gelar Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021
- 51 **INSIGHT**
 - Inovasi Literasi dan Edukasi Keuangan Digital melalui LMSKU

36

KONSUMEN BICARA

Bunga *Fintech* P2P *Lending* Turun 50%



5

SAJIAN UTAMA



Presidensi G20, Momentum Pemulihan Ekonomi bagi Sektor Jasa Keuangan



Presidensi G20, Momentum Pemulihan Ekonomi bagi Sektor Jasa Keuangan

Presidensi G20 Indonesia pada 2022 diharapkan dapat menghasilkan solusi atas permasalahan dunia, termasuk pemulihan di sisi kesehatan dan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Presidensi G20 Indonesia akan mengusung tema ‘*Recover Together, Recover Stronger*’. Dengan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan G20, Indonesia berkesempatan untuk menentukan agenda pembahasan G20.

Mengutip Kementerian Keuangan, G20 atau *Group of Twenty* merupakan forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.

G20 memiliki posisi strategis karena secara kolektif merupakan representasi dari 85% perekonomian

dunia, 75% perdagangan internasional, 60% populasi dunia, dan 80% investasi global.

Forum ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menemukan solusi atas kondisi ekonomi global yang saat itu dilanda krisis keuangan pada 1997-1999 dengan melibatkan negara-negara berpendapatan menengah dan memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik, termasuk Indonesia.

Adapun, forum G20 membahas dua arus isu, yaitu jalur keuangan (*finance track*) dan jalur *sherpa* (*sherpa track*). Fokus isu yang dibahas pada *finance track* adalah ekonomi dan keuangan, mencakup kebijakan fiskal, moneter dan riil, investasi

infrastruktur, regulasi keuangan, dan perpajakan internasional.

Sementara, isu yang dibahas pada arus isu *sherpa* lebih luas, di antaranya isu geopolitik, anti korupsi, pembangunan, perdagangan, energi, perubahan iklim, dan kesetaraan gender.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia ditargetkan mampu menyelesaikan situasi ketidakseimbangan yang terjadi di dunia pascapandemi Covid-19.

“Pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang terjadi secara tidak merata





merupakan tantangan bagi semua negara. Indonesia akan menjadikan isu ketidakseimbangan dalam pemulihan kesehatan, akses terhadap vaksin, dan pemulihan ekonomi global sebagai isu prioritas,” katanya.

KTT G20 pada 2022 akan difokuskan pada pembahasan isu-isu prioritas, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan yang inklusif, serta transformasi ekonomi berbasis digital.

Indonesia pun akan mengangkat isu keseimbangan dalam akses teknologi dan dana untuk mempercepat pengembangan energi berkelanjutan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presidensi G20 Indonesia pada *finance track* nantinya akan membahas tujuh agenda yang berfokus pada penanganan isu global terkini.

Pertama, yaitu membahas bagaimana koordinasi negara-negara G20 memulihkan ekonomi global. *Kedua*, mengatasi dampak berkepanjangan (*scarring effect*) yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

“Ada *supply disruption*, ada korporat yang mengalami kesulitan dari sisi neraca dan tidak kemudian bisa kembali pulih. Juga pembahasan mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali, bagaimana *policy-policy* akan bisa didesain,” jelasnya.

Agenda *ketiga*, yaitu pembahasan mengenai mata uang digital bank sentral, serta agenda keempat mengenai pembiayaan berkelanjutan, khususnya membahas dukungan sektor keuangan terhadap agenda penting di tingkat global, yaitu isu perubahan iklim.

Agenda *keempat* mengenai *green finance facility* termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal untuk menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan *sustainable*, juga akan dibahas mengenai bagaimana *digital infrastructure*



regulation dalam rangka untuk meningkatkan *leverage* dan mobilisasi *private sector investment*.

Agenda *kelima* pada *finance track*, yaitu mengenai *cross-border payment*. Agenda ini merupakan salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan sistem pembayaran, seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan ekonomi digital.

Selanjutnya, agenda *keenam* akan membahas mengenai inklusi finansial yang berfokus pada pengembangan kredit usaha kecil untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan digitalisasi dari usaha kecil menengah.

Terakhir, akan dibahas mengenai kemajuan dan pelaksanaan dari persetujuan dan perkembangan *global taxation principle*.

G20 Penggerak Utama Pemulihan Ekonomi Global

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa Presidensi G20 tahun depan berperan penting dalam mengatasi isu pemulihan dari pandemi Covid-19.

Dia memandang, G20 harus menjadi penggerak utama dalam

membantu negara-negara di dunia untuk bisa keluar dari krisis pandemi.

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian dunia. Terlebih lagi, pemulihan global saat ini terjadi secara tidak merata, di mana beban yang jauh lebih besar ditanggung oleh penduduk yang berada di negara *emerging* dan berkembang.

Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak paling signifikan pada kelompok penduduk miskin, wanita, disabilitas, lansia dan anak-anak.

“Tahun 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan Presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisasi kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.

Pemerintah Indonesia, dalam pelaksanaan Presidensi G20 untuk pertama kalinya dalam sejarah, akan memastikan agenda-agenda penting bagi banyak negara di dunia dapat tersampaikan dengan baik dan berupaya menghasilkan solusi yang nyata untuk mengatasi tantangan tersebut. ●



Presidensi G20: “*Recover Together, Recover Stronger*”

OJK berkomitmen untuk mendukung agenda iklim G20. Untuk mempercepat transisi sektor keuangan ke arah berkelanjutan, OJK menyusun peta jalan Keuangan Berkelanjutan dalam dua tahap yaitu periode 2015 – 2019 dan 2021 – 2025.

Adapun, pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Penguatan sinergi dan koordinasi dengan *stakeholders* menjadi perlu ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan dukungan OJK terhadap pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia 2022 melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan persiapannya.

Di dalam *Ministerial Talks on “Achieving Ambitious Target on GHG Emission Reduction”* yang digelar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari Konferensi Perubahan Iklim PBB 2021 atau COP26, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh

Santoso menegaskan komitmen jangka panjang OJK dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) dalam rangka mendukung upaya dunia menuju program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

“OJK memegang komitmen jangka panjang terhadap *Sustainable Finance* untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon. OJK terus mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Paris serta langkah negara untuk mencapai tujuan *Net Zero Emission*,” kata Wimboh.

Di dalam forum tingkat tinggi yang melibatkan 197 negara untuk membicarakan dan menanggulangi

isu perubahan iklim global itu, Wimboh menunjukkan bahwa OJK telah memantau risiko terkait perubahan iklim serta krisis energi yang menambah tekanan pada ekonomi global.

Beberapa isu yang dibahas a.l. tingginya biaya transisi ke ekonomi rendah karbon membawa tantangan dalam mempercepat implementasi pembiayaan berkelanjutan di negara berkembang. Pada saat bersamaan, risiko perubahan iklim harus diperlakukan sebagai prioritas tinggi dan perlu dikurangi dengan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan.

Dengan demikian, OJK telah menyusun peta jalan Keuangan Berkelanjutan untuk mempercepat keuangan berkelanjutan,



Penerbitan obligasi hijau atau *green bonds* dan obligasi bertema *Sustainable Development Goals (SDGs Bonds)* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

meningkatkan pasokan dan permintaan dana dan instrumen keuangan yang ramah lingkungan, serta memperkuat pengawasan dan koordinasi dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Di dalam peta jalan itu dicantumkan prioritas yang akan menjadi landasan pengembangan keuangan berkelanjutan ke depan adalah pengembangan taksonomi hijau; implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola; pelaksanaan program riil; inovasi produk dan layanan keuangan; serta kampanye nasional keuangan berkelanjutan.

Kemudian untuk mengakselerasi dan mengefektifkan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan di sektor jasa keuangan, OJK juga telah membentuk Satuan Tugas Keuangan Berkelanjutan yang terdiri dari berbagai institusi keuangan, baik dari perbankan, pasar modal maupun IKNB.

“OJK melalui *Sustainable Finance Roadmap* yang sudah memasuki fase kedua ini berharap kepada sektor jasa keuangan untuk dapat bersiap, memahami implikasi terhadap bisnis maupun ekspektasi domestik dan global serta tantangan kebijakan yang harus diterapkan di sektor jasa keuangan,” kata Wimboh.

Pembiayaan Hijau

Berdasarkan data terkini, sektor perbankan telah memberikan total pinjaman terkait keuangan

berkelanjutan sebesar US\$55,9 miliar atau setara Rp809,75 triliun. Hampir 50% bank di Indonesia yang mewakili 91% dari total aset pasar perbankan Indonesia menunjukkan komitmen yang meningkat dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, yang diukur dari laporan keberlanjutan mereka.

Sementara di pasar modal, penerbitan obligasi hijau atau *green bond* di pasar domestik tercatat US\$35,12 juta (Rp500 miliar) atau 0,01% dari total *outstanding bond*.

Sementara *global sustainability bond* yang diterbitkan oleh emiten Indonesia telah mencapai lebih dari US\$2,22 miliar (Rp31,6 triliun) dan portofolio *blended finance* telah mendapatkan komitmen sebesar US\$2,46 miliar (Rp35,6 triliun).

Adapun, penerbitan obligasi hijau atau *green bonds* dan obligasi bertema *Sustainable Development Goals (SDGs Bonds)* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin mengatakan ajang COP26 telah menjadi momentum Indonesia untuk menarik investasi hijau sebesar mungkin ke dalam negeri.

“Perubahan iklim sangat berdampak kepada seluruh masyarakat dunia sehingga perlu dilakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, pada

prinsipnya transisi yang dilakukan haruslah transisi yang *just* dan *affordable*,” ujar Masyita.

Tak hanya *green bond* konvensional, partisipasi masyarakat juga kian tinggi dalam menyerap obligasi hijau seperti green sukuk ritel yang ditawarkan pemerintah baru-baru ini yaitu Sukuk Tabungan Seri ST008. Hal itu terbukti dengan target penyerapan yang sudah tercapai walau masa penawaran belum berakhir.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko RI melaporkan total volume pemesanan pembelian ST008 yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp5 triliun dengan jumlah investor sebanyak 14.337 orang.

Adapun, ST008 yang diterbitkan dengan format hijau ini akan digunakan seperti obligasi hijau pada umumnya yaitu seluruh hasil penerbitan surat utang ini akan digunakan untuk membiayai proyek ramah lingkungan baik *refinancing* maupun *new financing*.

Penerbitan *green bond* ini diatur dalam Peraturan OJK No.60/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan. Di dalam beleid itu diatur sektor yang menjadi fokus pembiayaan dari pendanaan hijau a.l. terkait energi terbarukan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah, serta proyek dengan mengedepankan pencegahan polusi. ●



OJK Siapkan Delapan Arah Kebijakan Strategis Tahun 2022

OJK telah menyiapkan delapan kebijakan strategis pada 2022 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia dengan terus mengoptimalkan manfaat sektor jasa keuangan bagi masyarakat.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, tantangan pada tahun depan harus dijawab dengan tetap berpedoman pada pelaksanaan tugas OJK sebagaimana tercantum dalam *destination statement* periode 2017-2022.

“Kami terus bersinergi dengan berbagai pihak agar dapat memberikan manfaat dan

kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” kata Wimboh.

Delapan arah strategis kebijakan OJK 2022 tersebut yaitu, *pertama*, mengantisipasi dampak risiko *cliff effect* dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19.

Kedua, mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim.

Ketiga, mendorong percepatan transformasi ekonomi digital.

Keempat, meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. *Kelima*, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan syariah.

Keenam, melanjutkan inisiatif perubahan proses bisnis pengawasan dari *traditional approach*



ke arah pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Ketujuh, melakukan percepatan reformasi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). *Kedelapan*, mengembangkan organisasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

Wimboh menyampaikan, OJK akan terus fokus pada penerapan program inisiatif keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) melalui penerbitan ketentuan untuk memitigasi risiko perubahan iklim terhadap industri jasa keuangan melalui program yang terintegrasi dan mendorong pengembangan sumber pembiayaan yang mendukung upaya mengatasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon.

OJK juga akan terus melakukan percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal, mempercepat penerapan *Supervisory Technology* dan *Regulatory Technology* serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan *Big-Tech* di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum *bankable* dan pelaku UMKM) serta perlindungan konsumen juga menjadi hal penting untuk dikembangkan.

Program yang disiapkan oleh OJK akan mendukung program inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Fungsi perlindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan OJK, Tirta Segara mengatakan, inklusi keuangan akan memberikan sejumlah manfaat.

Paling utama adalah sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, di tengah upaya pemulihan ekonomi

dari dampak pandemi Covid-19, inklusi keuangan menjadi semakin penting untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

“Karena penyaluran pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, mikro, bahkan ultra mikro dapat menjadi *game starter* untuk menggerakkan kembali roda perekonomian,” katanya, dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2021, Selasa (2/11/2021).

Kemudian, inklusi keuangan juga diproyeksikan mampu mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dalam berbagai situasi dan kondisi perekonomian. Pasalnya, dengan adanya akses terhadap produk dan layanan keuangan, disertai tingkat literasi yang tinggi, peluang masyarakat untuk bertahan dari berbagai situasi semakin kuat.

Bukan hanya itu, dengan adanya akses ke produk dan layanan keuangan, Tirta menilai, masyarakat akan cenderung memiliki masa depan yang lebih baik.

Sebab, dengan adanya pemahaman yang baik tentang produk dan layanan keuangan, masyarakat diprediksi akan memiliki kebiasaan untuk menabung dan memiliki investasi untuk masa depannya.

Sementara, perlindungan konsumen akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain meningkatkan aspek transparansi produk dan jasa keuangan.

Melalui transparansi yang ditunjang ketersediaan dan kelengkapan informasi yang memadai akan mendorong konsumen dan masyarakat lebih mengetahui manfaat, biaya, dan risiko dari produk dan jasa keuangan sebelum membelinya karena masyarakat punya kesempatan luas untuk memilih dan membandingkan beragam produk yang ditawarkan lembaga jasa keuangan.

Bagi lembaga jasa keuangan, perlindungan konsumen akan memberikan manfaat dalam menumbuhkembangkan entitas



Program yang dikeluarkan oleh OJK akan mendukung program inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Fungsi perlindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan.

bisnis. Sebab, masyarakat merasa lebih aman menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan lembaga jasa keuangan sehingga loyalitas dan jumlah mereka terus meningkat.

Adapun, penguatan sinergi dan koordinasi dengan *stakeholders* juga perlu terus ditingkatkan, kaitannya dengan dukungan OJK terhadap pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan persiapannya.

Seluruh unit kerja di OJK diharapkan dapat berfokus kepada arah kebijakan strategis tersebut dan dapat dijabarkan dalam program kerja yang lebih rinci, *workable*, dapat dimonitor, diukur dan dievaluasi pencapaiannya. ●



Insentif dan Program Pemerintah Bangkitkan Industri Keuangan 2022

Kinerja sektor jasa keuangan terus menunjukkan tren perbaikan, sejalan dengan berlangsungnya pemulihan ekonomi dan didukung oleh berlanjutnya stimulus pemerintah dan otoritas terkait.

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian banyak negara, tak terkecuali Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana mengatakan, kondisi ini tercermin dari perekonomian Indonesia yang sempat berkontraksi sebesar -5,32% pada kuartal II/2020.

Kontraksi pertumbuhan juga turut dirasakan oleh industri

keuangan. Pada 2020 misalnya, tren pertumbuhan aset industri perbankan mengalami perlambatan. Di samping itu, dikarenakan lemahnya permintaan domestik, perbankan pun semakin selektif dalam menyalurkan kredit, apalagi di tengah bayang-bayang peningkatan risiko kredit.

Meski demikian, strategi dan kolaborasi yang terjalin erat antara pemerintah dan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) dan OJK melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mampu menjaga stabilitas keuangan.

“Stabilitas ekonomi dan sistem keuangan sempat terancam pada awal pandemi, tetapi telah kembali membaik dan tetap terjaga,” katanya.

Perekonomian domestik mencatatkan pertumbuhan yang positif pada kuartal II/2021 dan kuartal III/2021, yang masing-masing sebesar 7,07% dan 3,51% secara tahunan.



Sejalan dengan itu, penyaluran kredit perbankan mulai tumbuh positif sejak pertengahan 2021. Per Oktober 2021, OJK mencatat kredit perbankan tumbuh 3,24%. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara *gross* terjaga pada tingkat 3,22%.

“Kita mencatat permodalan tergolong kuat dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang tercatat sebesar 25,34% dan dana pihak ketiga tumbuh 9,4%, ini menjaga likuiditas perbankan tetap *ample*,” jelas Heru.

Perkembangan yang positif tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan pemerintah, BI, OJK, juga LPS. OJK misalnya, pada 2020 menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 yang telah diamandemen dua kali dan terakhir menjadi No.17/POJK.03/2021.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menyampaikan, stimulus melalui POJK No. 11/2020 tersebut berhasil menjaga kondisi sektor keuangan tetap stabil.

Dari sisi fiskal, pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara melalui kebijakan UU No. 2/2020. Suahasil menjelaskan, melalui kebijakan ini, defisit APBN diperbolehkan meningkat di atas 3% hingga 2022.

Hal ini dikarenakan meningkatnya belanja pemerintah secara signifikan, khususnya untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, di tengah penerimaan pajak yang tertekan.

“Sampai dengan 2023, kita memberikan insentif dan belanja negara ekstra yang kita sebut anggaran pemulihan ekonomi nasional,” kata Suahasil.

Pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Program PEN sebesar Rp744,77 triliun, difokuskan pada lima kelompok, di antaranya kesehatan, perlindungan



sosial, program prioritas, serta dukungan UMKM dan korporasi.

Hingga 19 November 2021, realisasi anggaran PEN tersebut telah mencapai Rp495,77 triliun atau 66,6% dari pagu anggaran Program PEN 2021.

Khusus anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi, realisasi hingga 19 November 2021 tercatat mencapai Rp81,83 triliun atau 50,4% dari pagu anggaran sebesar Rp162,4 triliun.

Untuk mendorong konsumsi masyarakat, pada tahun ini pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon pajak atau Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian kendaraan bermotor hingga 100%, berlaku sampai dengan Desember 2021.

Pemerintah pun memperpanjang jangka waktu pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk pembelian rumah tapak dan unit hunian rumah susun hingga Desember 2021.

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo menyampaikan, dari sisi bank sentral, seluruh kebijakan diarahkan untuk mendorong PEN, termasuk menjaga stabilitas sektor keuangan, serta mendorong penyaluran pembiayaan dari perbankan kepada sektor riil.

“Inilah yang kita lakukan dengan berbagai kebijakan, relaksasi kebijakan oleh OJK, kebijakan akomodatif oleh BI maupun LPS, semua bagaimana agar perbankan

lebih mudah men-*chanelling*-kan kredit ke sektor riil,” katanya.

Hingga November 2021, Dody mengatakan suku bunga acuan atau BI-7 *Day Reverse Repo Rate* tetap dijaga rendah pada level 3,5%. Tingkat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

BI pun telah menambah likuiditas ke perbankan (*quantitative easing*) sebesar Rp137,24 triliun hingga 16 November 2021.

Kebijakan lainnya, BI menerapkan dan terus memperkuat kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Aturan ini dimaksudkan untuk memicu penurunan suku bunga kredit di perbankan.

Dody menambahkan, BI melalui kebijakan yang akomodatif turut mendorong penyaluran kredit perbankan, salah satunya melalui pelonggaran rasio *Loan to Value/ Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/ pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100%, berlaku hingga 31 Desember 2022.

Selain itu, BI melonggarkan ketentuan uang muka kredit/ pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, berlaku hingga 31 Desember 2022.

Dengan berbagai kebijakan di atas, juga didukung stimulus dari pemerintah dan otoritas terkait, serta terus berlanjutnya pemulihan ekonomi, kredit perbankan diperkirakan tumbuh 6% hingga 8% pada tahun depan. ●



Buku Literasi Keuangan, Bekal bagi Calon Pengantin

Belakangan ramai perbincangan terkait angka kasus perceraian yang meningkat selama pandemi Covid-19.

Laporan dari sejumlah daerah menyebutkan kenaikan angka perceraian terjadi karena permasalahan ekonomi dan diperparah perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 memukul hampir seluruh sektor usaha. Kondisi itu berujung pada tidak sedikit usaha yang gulung tikar, pemotongan gaji karyawan, hingga pemutusan hubungan kerja.

Di Kabupaten Cirebon misalnya, dari Januari hingga Agustus 2020, angka perceraian tercatat sebanyak 4.674 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun lalu yang sebanyak 4.000 kasus perceraian.

Berdasarkan catatan pengadilan agama setempat, 90% perkara perceraian yang terjadi di Kabupaten Cirebon diakibatkan oleh permasalahan ekonomi dan diperparah perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Setiap tahun angka perceraian di Indonesia mencapai sekitar 400 ribu dan faktor perceraian paling dominan adalah faktor ekonomi. Selain itu perceraian masalah ekonomi juga turut menjadi penyebab masalah keluarga lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga.” dikutip dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Prof. D. H. Kamaruddin Amin, MA., dalam peluncuran Buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan bagi Calon Pengantin.

D. H. Kamaruddin Amin, MA.,
dalam peluncuran Buku
Saku Cerdas Mengelola
Keuangan bagi Calon
Pengantin.

Dari situ, OJK menghadirkan buku literasi keuangan bagi calon pengantin. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara mengatakan pemahaman terhadap aspek finansial dalam berumah tangga saat ini telah menjadi kebutuhan esensial.



Oleh karena itu penting bagi kaum muda yang sedang mempersiapkan pernikahannya, untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan keuangan keluarga/rumah tangga yang baik. Buku saku ini disusun dan disajikan oleh OJK bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Buku dengan judul ‘Buku Saku Cerdas Mengelola Keuangan’ ini,

akan memberikan wawasan kepada calon pengantin terkait pengelolaan keuangan yang sederhana. Literasi dan pengelolaan keuangan disajikan dari perspektif ajaran agama.

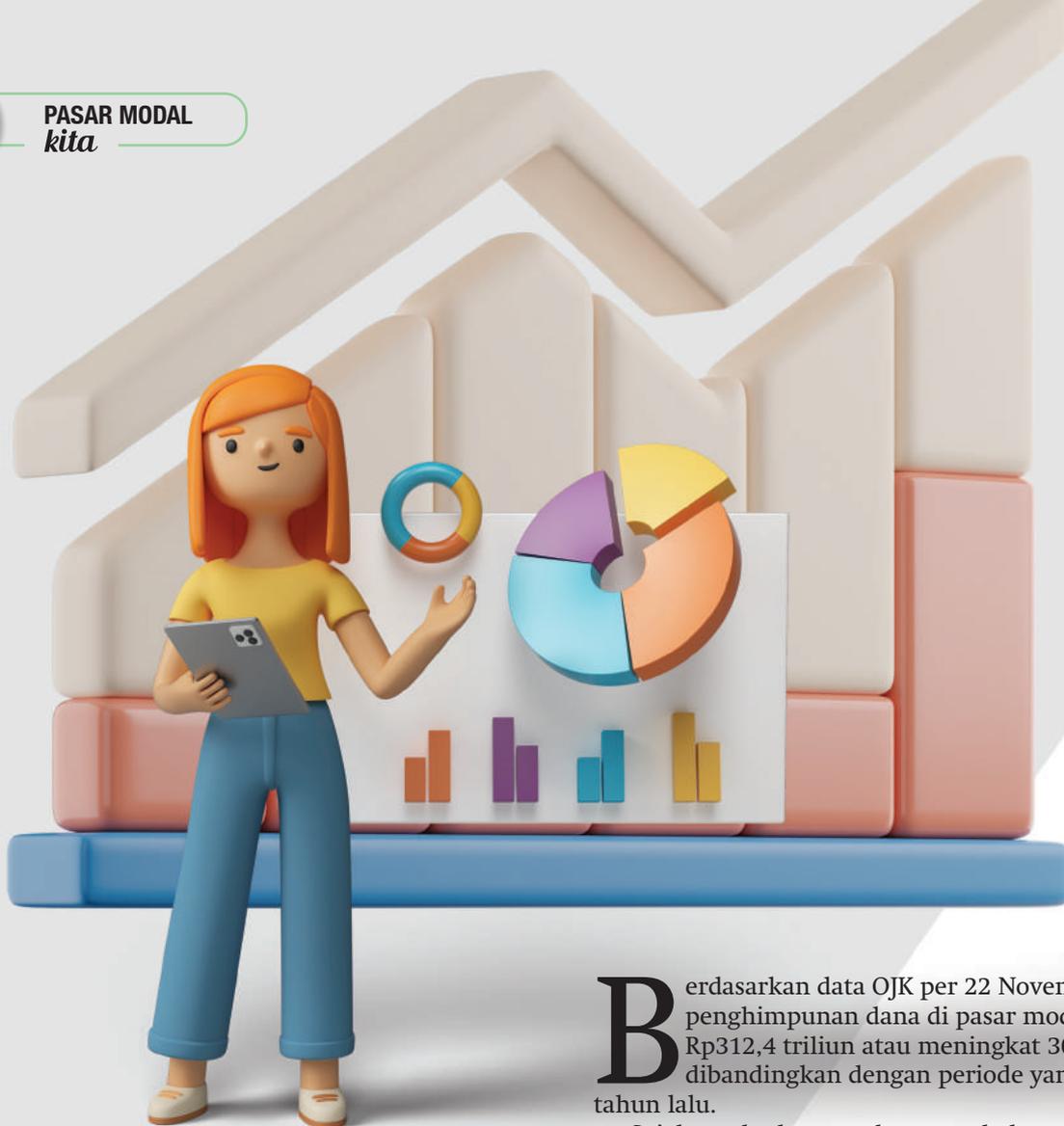
Pada bab kedua, calon pengantin akan diajak untuk mulai merencanakan keuangan keluarga. Berlanjut ke bab berikutnya, calon pengantin dapat mengenal produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan keluarga seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan lainnya.

Melalui buku ini, calon pengantin dapat mengetahui pentingnya berasuransi dan manfaat *multifinance* dalam pembiayaan kebutuhan keluarga. Langkah mempersiapkan pensiun sejak dini juga dibahas dalam buku ini.

Buku ini juga mengulas layanan jasa keuangan seperti pergadaian dan *fintech* pendanaan bersama untuk mendukung tujuan menjadi keluarga yang produktif.

Buku setebal 142 halaman ini juga dilengkapi ilustrasi berupa simulasi penggunaan produk dan layanan. Di samping itu, calon pengantin akan dituntun untuk memahami aspek perlindungan konsumen keuangan.

Buku yang telah diluncurkan sebagai infrastruktur literasi keuangan pada 20 Desember 2021 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum muda yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah. Adapun buku dimaksud dapat diunduh melalui sikapiuangmu.ojk.go.id atau melalui <https://bit.ly/BukuCalonPengantin>. ●



Pasar Modal Indonesia, Makin Semangat Tembus Rekor Tertinggi

Penggalangan dana di lantai bursa menjadi pilihan utama perusahaan untuk membiayai rencana ekspansi. Bahkan, nilai emisi saham di Bursa Efek Indonesia pada 2021 mencapai rekor tertinggi di tengah pandemi.

Berdasarkan data OJK per 22 November 2021, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp312,4 triliun atau meningkat 300,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sejak awal tahun, terdapat tambahan emiten baru sebanyak 43 perusahaan tercatat yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih baik.

Beberapa aksi korporasi yang mencuri perhatian publik pada 2021 a.l. aksi penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering/IPO*) dari perusahaan teknologi PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA). BUKA meraup dana segar hingga Rp21,9 triliun dari aksi korporasi tersebut dan dapat dikatakan sebagai nilai emisi tertinggi sepanjang sejarah.

Selanjutnya keberhasilan penambahan modal lewat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *rights issue* dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) juga tak bisa dipandang sebelah mata. Dalam *rights issue* tersebut, BBRI menggalang dana hingga Rp95,9 triliun dari investor pasar modal.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso menyampaikan, pemulihan ekonomi Indonesia yang terus membaik serta penanganan penyebaran pandemi Covid-19 telah meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi perekonomian Indonesia ke depan.

OJK pun akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan peran pasar



modal sebagai sumber pendanaan. Salah satunya melalui dukungan penyusunan kebijakan yang akomodatif bagi *start-up* dan perusahaan teknologi berskala *unicorn* untuk melakukan IPO.

“OJK sedang menyiapkan kebijakan mengenai *Multiple Voting Shares* (MVS) agar para pemilik *start-up* dapat mempertahankan perkembangan usahanya sesuai dengan visi dan misi awal perusahaan,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyampaikan, regulasi MVS telah masuk tahap finalisasi untuk segera diberlakukan. Bursa bersama *Self Regulatory Organization* (SRO) terus mengintensifkan diskusi dengan OJK terkait penggodokan aturan tersebut.

Adapun, penggunaan MVS merupakan salah satu upaya untuk menarik raksasa teknologi atau *unicorn* bahkan *decacorn* untuk bisa menjadi perusahaan tercatat di BEI. Pada akhir tahun ini, entitas merger Gojek dan Tokopedia (GoTo) sudah bersiap untuk maju *go public* dengan memanfaatkan fasilitas MVS tersebut.

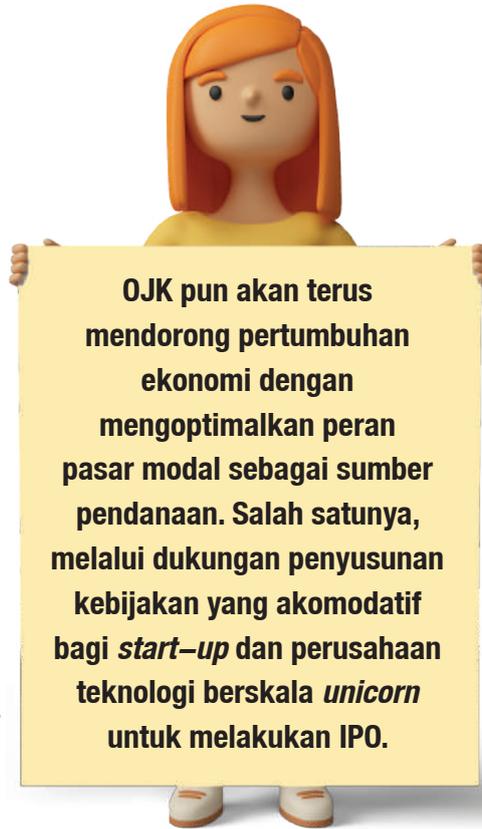
Grup GoTo pun telah mengumumkan penutupan pertama penggalangan dana pra-IPO yang mencapai lebih dari Rp18,56 triliun.

Implementasi MVS nantinya akan langsung diawasi oleh OJK. Regulator juga akan mengatur tentang kriteria yang dibutuhkan emiten untuk mendapatkan izin MVS seperti model bisnis dan valuasi.

Oleh karena aturan MVS ini tergolong baru, Nyoman menegaskan, regulator juga akan menjamin perlindungan investor publik seperti memberikan notasi khusus untuk emiten yang mendapat izin MVS.

“Kami akan menaruh notasi khusus terkait MVS bahwa

ada perbedaan bobot dalam pengambilan suara. Notasi khusus itu akan ditaruh pada kode *ticker* saham sehingga investor mengetahui emiten tersebut memiliki MVS atau tidak,” jelas Nyoman.



OJK pun akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan peran pasar modal sebagai sumber pendanaan. Salah satunya, melalui dukungan penyusunan kebijakan yang akomodatif bagi *start-up* dan perusahaan teknologi berskala *unicorn* untuk melakukan IPO.

Arah Pasar Saham

Tak hanya dari sisi penggalangan dana, pasar modal Indonesia juga bertumbuh dari sisi jumlah investor yang akhirnya meningkatkan frekuensi transaksi harian di BEI.

Data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor di pasar modal mencapai 6,75 juta *Single Investor Identification* (SID) pada 29 Oktober 2021. Sejak awal tahun, investor di pasar modal bertambah 74,15%.

Kenaikan jumlah investor itu pula yang membuat optimistis BEI dengan menargetkan Rata-rata Nilai Transaksi Harian (RNTH)

mencapai Rp13,5 triliun pada tahun depan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga telah mencapai level tertingginya sepanjang sejarah (*all time high*) pada 19 November 2021 di level 6.720. Posisi itu membawa IHSG naik 12,4% sejak awal tahun (*year-to-date/lytd*).

Namun, sejumlah analis menilai IHSG akan makin mengejar level tertingginya pada tahun depan. CIO Danareksa Investment Management, Herman Tjahjadi bahkan menargetkan IHSG bisa bergerak pada kisaran 6.500-7.300 pada 2022.

“Saham dari emiten yang bisnisnya bangkit bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi layak dicermati seperti saham perbankan, properti, dan *consumer discretionary*,” kata Herman.

Saham sektor riil seperti otomotif, properti operator mal, logistik, dan konstruksi juga disebut berpotensi memberikan imbal hasil yang tinggi ketika ekonomi pulih. Namun, Herman mengingatkan tantangan bagi pergerakan IHSG di tengah optimisme 2022 masih berasal dari perkembangan Covid-19 di dalam negeri maupun di luar negeri.

Equity Strategist Morgan Stanley, Daniel Blake dan Jonathan Garner dalam riset terbaru juga memasang posisi *overweight* untuk pasar saham Indonesia pada 2022.

“Kami *outperform* terhadap saham di Indonesia seiring dengan pembukaan kembali ekonomi pasca Covid-19 dan valuasinya relatif murah dibandingkan India yang memiliki peluang struktural serupa,” tulis Blake dan Garner dalam riset.

Seiring dengan literasi keuangan yang kian dalam di pasar modal, ke depannya investor juga diperkirakan bakal mempertimbangkan prinsip keuangan berkelanjutan atau *Environment, Social, dan Governance* (ESG) dalam berinvestasi. ●



Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

Transformasi digital di sektor perbankan merupakan suatu keniscayaan. Selama beberapa tahun belakangan ini, tuntutan akselerasi digital semakin mengemuka didorong perubahan ekspektasi publik akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja.

Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank.

Seiring dengan berbagai perkembangan dalam bisnis perbankan yang bergerak dalam strategi bisnis digital, OJK memandang berbagai pengaturan *existing* perlu lebih diperkuat khususnya pengaturan yang terkait dengan teknologi informasi di sektor perbankan.

Dalam *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, salah satu pilar yang menjadi arah kebijakan adalah akselerasi transformasi digital perbankan. Pilar ini dijabarkan lebih lanjut melalui Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan yang telah diterbitkan oleh OJK.

Cetak biru tersebut berfokus pada lima elemen pengembangan digitalisasi perbankan. *Pertama*, mencakup perlindungan data, transfer data, dan tata kelola data. *Kedua*, melingkupi tata kelola Teknologi Informasi (TI), arsitektur teknologi dan prinsip adopsi TI.



Ketiga, terkait manajemen risiko TI yang mencakup keamanan siber bank umum dan alih daya. *Keempat*, kolaborasi *platform sharing*, kerja sama bank dalam ekosistem digital, dan *kelima* bertalian dengan tatanan institusi yang mencakup kepemimpinan hingga budaya.

“Peluncuran cetak biru ini merupakan gambaran yang lebih konkret atas berbagai inisiatif dan komitmen OJK dalam mendorong akselerasi transformasi digital pada perbankan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana pada *Grand Launching* Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan di Jakarta, Selasa (26/10/2021).

Heru menyatakan, Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti studi tentang masa depan perbankan, kondisi digitalisasi perbankan, standar internasional, *best practices* industri, masukan *stakeholder*, dan harmonisasi kebijakan.

Cetak Biru ini juga mengedepankan tiga karakteristik mendasar. *Pertama*, menganut konsep *Principle Based*. Cetak Biru ini memberikan aturan dalam bentuk prinsip-prinsip umum (*guiding principle*) untuk memberikan ruang bagi industri untuk berkembang.

Kedua, lebih kepada pendekatan *Facilitative*. Cetak Biru disusun untuk memfasilitasi dan mendorong inovasi digital tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.



Ketiga, *Living Document*. Cetak Biru bersifat dinamis dan akan terus diperbaharui untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi pada perbankan.

Blueprint juga mengedepankan aspek keseimbangan dan teknologi netral (*balance and technology neutral*). Aspek keseimbangan (*balance*) bertujuan mendorong inovasi perbankan dengan memerhatikan aspek prudensial, sementara teknologi netral (*technology neutral*) berupaya membuat perbankan lebih fleksibel dalam menerapkan teknologi tertentu.

OJK sebelumnya juga merilis kebijakan terkait dengan transformasi digital perbankan, yakni *Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025 (MPSJKI) Pilar 3* dan *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I) Pilar 2*.

Kedua kebijakan itu mengarahkan perbankan untuk mengakselerasi transformasi digital dengan tetap menerapkan tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi memadai.

Kerugian akibat Serangan Siber

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat, mengatakan manajemen risiko terkait dengan serangan siber perlu disiapkan seiring dengan transformasi digital.

Secara global, industri jasa keuangan mengalami kerugian senilai US\$100 miliar atau setara Rp1.416 triliun akibat serangan siber. Data ini merupakan hasil kajian International Monetary Fund (IMF).

Di Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat jumlah serangan siber yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2021 mencapai 741,4 juta serangan.

Jumlah ini naik dua kali lipat dibandingkan 2020, yakni 495,3 juta serangan.

“Oleh karena itu, dengan adanya transformasi digital, mau tidak mau kita juga harus menyiapkan manajemen risiko terkait dengan siber tersebut,” kata Teguh.

Berdasarkan Laporan Strategi Anti *Fraud* periode semester I/2020 hingga semester I/2021, Teguh mengungkapkan, kerugian riil yang dialami Bank Umum sebesar Rp246,5 miliar dengan *potential loss* Rp208,4 miliar, sementara nilai pemulihan Rp302,5 miliar.

Adapun kerugian riil yang dialami pihak lain sebesar Rp9,1 miliar dan *potential loss* mencapai Rp3,8 miliar, nilai *recovery* Rp3,8 miliar. Selama periode itu, ada 7.087 laporan kejadian *fraud* dengan siber dengan 45% kejadian dilaporkan pada semester II/2020.

Dari jumlah tersebut, mayoritas kejadian *fraud* dengan menggunakan siber sebanyak 71,6% dilaporkan terjadi pada bank umum milik pemerintah, disusul oleh bank swasta sebanyak 28%, dan bank asing sebanyak 0,3%.

Selain itu, terdapat 47,48% dari total kasus *fraud* dengan penggunaan siber yang masuk ke dalam tindakan lain, seperti *skimming* dan *social engineering*. ●



Di Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat jumlah serangan siber yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2021 mencapai 741,4 juta serangan. Jumlah ini naik dua kali lipat dibandingkan 2020, yakni 495,3 juta serangan.



IKNB
kita

Pembiayaan Berbasis Lingkungan Turut Serta Mendorong UMKM

Peran perbankan dalam menyalurkan pembiayaan untuk sektor berkelanjutan terus dipacu, termasuk pada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., misalnya, mencatatkan portofolio kredit berkelanjutan mencapai Rp588,6 triliun hingga kuartal II/2021 dan disalurkan kepada segmen UMKM, kegiatan bisnis berbasis energi terbarukan, *clean transportation*, *green building*, dan lainnya.

Direktur Utama BRI, Sunarso menyampaikan, bahwa capaian tersebut setara dengan 64,5% dari total portofolio kredit yang disalurkan perseroan.

“BRI konsisten memperkuat implementasi ESG [Environment, Social, and Governance], sehingga mampu memberikan *value* berkelanjutan kepada seluruh *stakeholder*,” katanya.

Sunarso mengatakan, dari sisi liabilitas, perseroan pada 2019 menerbitkan *Sustainability Bond*. Seluruh dana yang mencapai

US\$500 juta dari penerbitan *bond* tersebut digunakan untuk kegiatan berwawasan sosial dan lingkungan.

Sementara, dari sisi operasional, imbuhnya, BRI telah mengembangkan berbagai inisiatif digital dalam *business process reengineering*, dengan tujuan mendukung pelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas dan emisi karbon.

Bank lainnya, PT Bank Central Asia Tbk. mencatat penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan mencapai Rp143,1 triliun hingga kuartal III/2021.

Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja menyampaikan, bahwa capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 25% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Nilai ini pun setara dengan 23,6 persen dari total portofolio kredit perseroan, mencakup pembiayaan kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan lahan yang berkelanjutan.

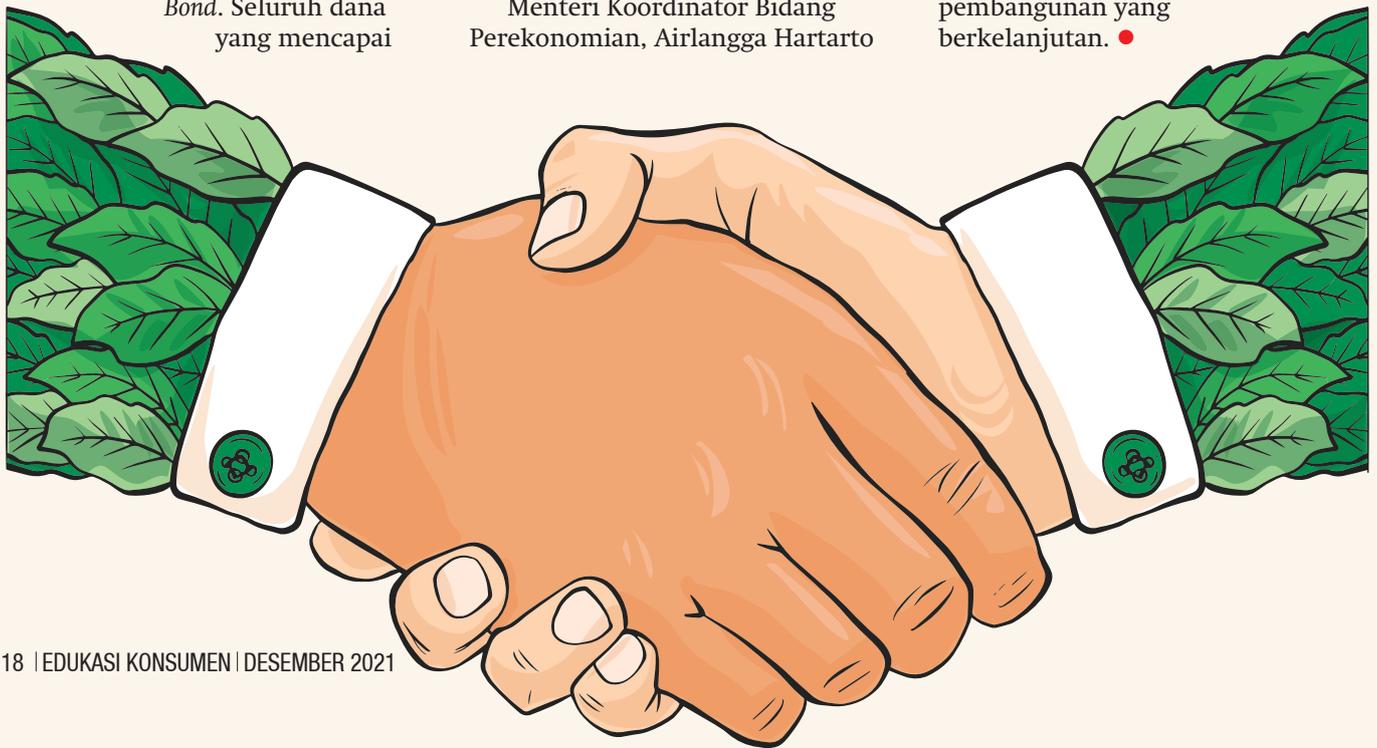
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

menyampaikan, optimalisasi peran perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor berkelanjutan perlu terus didorong, terutama untuk mendukung percepatan transisi ekonomi menuju ekonomi rendah karbon.

Pasalnya, perubahan iklim menjadi tantangan bagi pembangunan ekonomi global dalam jangka panjang. Diperkirakan, akan terjadi kenaikan suhu sebesar 2,5 hingga 4,7 derajat celsius pada 2100 akibat peningkatan Gas Rumah Kaca.

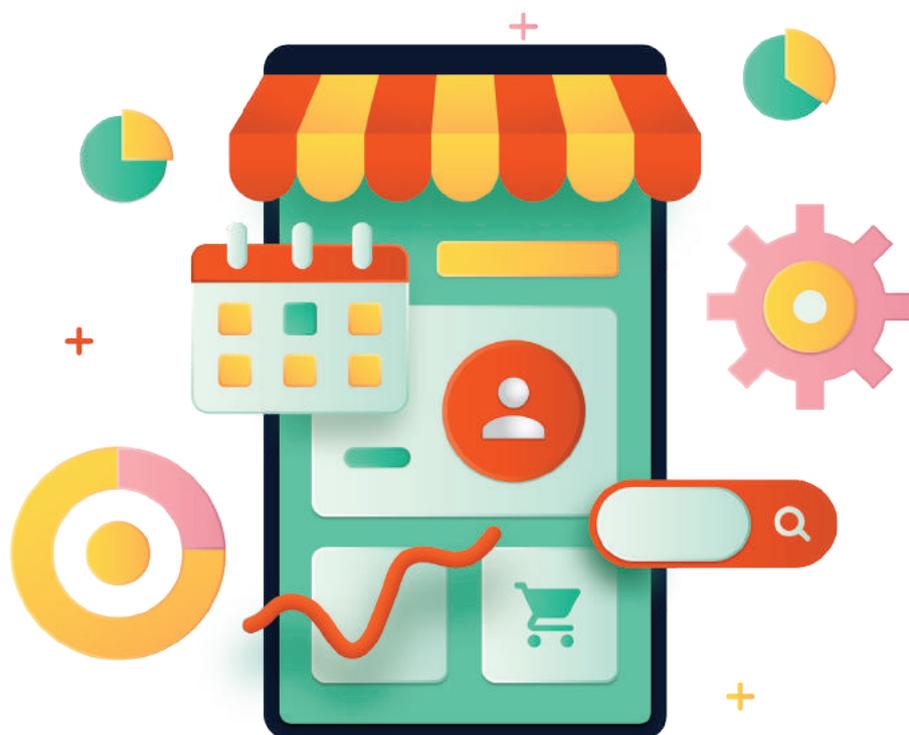
Sementara, Indonesia melalui Nationally Determined Contributions (NDC) telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dalam kondisi *business as usual*. Pemenuhan target emisi gas rumah kaca pada 2030 sesuai NDC tersebut membutuhkan biaya sekitar US\$250 miliar.

Percepatan transisi, kata Airlangga, salah satunya dapat dilakukan jika perbankan secara agresif membiayai proyek-proyek hijau ataupun pembangunan yang berkelanjutan. ●





Digitalisasi Pembiayaan untuk UMKM



OJK saat ini. OJK pun mendorong pengembangan sektor UMKM dan menyatukan proses bisnis UMKM dalam satu ekosistem yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir dengan menggunakan *platform* digital.

OJK mengembangkan Bank Wakaf Mikro (BWM) berbasis digital untuk mendukung pembiayaan UMKM yang disertai dengan pendampingan. Saat ini telah berdiri 61 BWM per September 2021 dan telah dirasakan manfaatnya oleh 47.600 nasabah dengan jumlah pembiayaan yang tersalurkan mencapai Rp72 miliar.

OJK juga membuka akses pembiayaan UMKM melalui pendekatan *fintech* P2P *lending* dan *security crowdfunding* [SCF] untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum *bankable* agar mendapatkan pembiayaan. Kehadiran *fintech* akan memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, khususnya generasi muda dan UMKM yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari lembaga keuangan formal lainnya.

Di samping itu, langkah pengembangan UMKM lainnya yakni membangun *platform* agar UMKM dapat memasarkan produknya melalui *platform* digital *e-commerce* bernama UMKM-MU. *Platform* ini tidak hanya sebagai tempat untuk memasarkan produk unggulan UMKM, tetapi juga sebagai media untuk meningkatkan literasi digital pelaku UMKM seperti mengakses pembiayaan digital.

Perluasan akses keuangan kepada pelaku UMKM juga dilakukan melalui program Digital Kredit UMKM atau Digiku. Program Digiku diinisiasi oleh bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk melengkapi ekosistem digital dalam mendorong UMKM melalui akses pembiayaan yang murah. ●

OJK mendorong sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masuk ke ekosistem digital untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak setahun lalu memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi global dan domestik. Salah satu sektor yang paling banyak terkena dampak pandemi, yakni UMKM.

Wimboh mengatakan, sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian karena kontribusinya mencapai 57,24% dari total Produk

Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 90,99% dari total pelaku usaha atau setara dengan 64 juta pelaku usaha berasal dari UMKM.

Sektor ini menyerap tenaga kerja yang besar yakni mencapai 117 juta orang atau 97% dari total tenaga kerja Indonesia. "Mempertimbangkan besarnya peran UMKM, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan agar sektor ini bisa bertahan di tengah pandemi," kata Wimboh dalam webinar *Business Matching* Digitalisasi Pembiayaan untuk UMKM pada September lalu.

Pengembangan UMKM melalui digitalisasi juga menjadi fokus



EDUINVEST



World Investor Week 2021: Upaya OJK Tingkatkan Edukasi Investor Pasar Modal

Kombinasi perkembangan teknologi dan pandemi menjadi salah satu pendorong kenaikan jumlah investor di pasar modal dalam dua tahun terakhir.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat pertumbuhan investor di pasar modal naik 74,15% menjadi 6,75 juta Single Investor Identification (SID) pada 29 Oktober 2021 sejak awal tahun.

Kenaikan itu bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan jumlah investor tahun lalu sebesar 56,21%. Selain itu, jumlah investor reksa dana naik lebih tinggi lagi pada periode yang sama sebesar 92,40% menjadi 6,10 juta SID.

Berdasarkan demografinya, investor individu paling banyak berumur di bawah 30 tahun yaitu 59,50% dengan total aset Rp40,56 triliun. Sementara, aset paling tinggi dimiliki oleh kelompok umur di atas 60 tahun sebanyak Rp458,44 triliun walaupun jumlah investor kelompok ini hanya 3,06%.

Sebagai bentuk partisipasi OJK dalam keanggotaan Working Group IOSCO-C8, OJK pada Oktober 2021 kembali menyelenggarakan

rangkaian kampanye terkait perlindungan bagi investor di pasar modal melalui kegiatan World Investor Week (WIW) 2021.

Untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan para investor di pasar modal, OJK menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI) menyelenggarakan WIW 2021.

Acara ini diselenggarakan pada 13 Oktober hingga 20 Oktober 2021 atau pada bulan yang sama dengan perayaan Bulan Inklusi Keuangan dan perayaan HUT Pasar Modal yaitu *Capital Market Summit Expo*.

Tema WIW 2021 terkait dengan edukasi pasar modal mencakup pengenalan produk, investasi secara *online*, serta tips menghindari penipuan berkedok investasi. OJK pun mengajak Kantor Regional/ Kantor OJK (KR/KOJK) untuk berpartisipasi dalam kegiatan edukasi ini melalui stasiun radio lokal di daerah masing-masing.

Dalam WIW 2021 ini, telah diadakan sebanyak total 335 kegiatan dengan total 895.864 peserta. Kegiatan itu terdiri dari 132 *live* Instagram, 190 edukasi pasar modal, 12 radio *talkshow*, dan 1 *podcast*.

Kegiatan edukasi ini dilaksanakan di beberapa kota besar

di berbagai provinsi seperti Aceh, Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Maluku, NTB, NTT, Riau, Papua, Sulawesi dan Sumatera.

Beberapa tema yang dibicarakan seperti “Investasi Aman dan Nyaman di Pasar Modal” melalui siaran radio. Selanjutnya *live* Instagram mengangkat beberapa tema seperti “Investasi *Online*, Gak Pake Ribet” dengan narasumber Raymond Iriantho selaku Financial Mentor Bibit.

Selain itu ada pula *live* Instagram “Yuk, Turut Menjaga Bumi dengan Investasi pada *Green Investment*” dengan narasumber Direktur Pengembangan BEI, Hasan Fawzi.

Paralel dengan *talkshow*, OJK juga mempublikasikan konten edukasi terkait pasar modal di *minisite* dan media sosial Sikapiuangmu dengan total jangkauan dari publik sebanyak 141.743 kali.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, mengatakan, kenaikan jumlah investor di pasar modal akan menggeliatkan transaksi di bursa saham hingga 2022. “Ini dan karena *confidence* masyarakat, fundamental pasar modal kita tetap tinggi,” kata Wimboh. ●



Pilih Dana Darurat, Asuransi, atau Investasi?

Pandemi Covid-19 hingga kini belum berakhir, meskipun kasusnya sudah mulai berkurang di Tanah Air. Roda perekonomian yang sempat tersendat pun perlahan berputar lebih kencang.

Dengan situasi yang membaik, Anda mungkin bertanya apakah 2022 saatnya untuk menabung, atau semakin agresif berinvestasi?

1. Dana Darurat

Ibarat sebuah mobil, dana darurat adalah *shock breaker* atau peredam guncangan yang datang sewaktu-waktu tanpa disangka.

Dengan keberadaan *shock breaker*, maka perjalanan mobil bisa dipertahankan tetap mulus dan stabil.

Sebagai contoh, ketika tiba-tiba rumah Anda mengalami kebocoran akibat hujan deras, dana darurat bisa dialokasikan untuk membiayai renovasi rumah.

Adapun, dalam kondisi pandemi, dana darurat dapat dipakai sewaktu-waktu bila Anda atau keluarga jatuh sakit sehingga membutuhkan biaya yang tidak *tercover* oleh asuransi kesehatan.

Oleh karena itu, dalam urutan prioritas, memenuhi kebutuhan dana darurat adalah hal utama. Begitu Anda memiliki pendapatan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menyisihkan sebagian untuk ditabung sebagai dana darurat.

Tempatkan dana darurat di instrumen keuangan yang likuid

dan berisiko rendah seperti tabungan bank, deposito berjangka, emas, reksa dana pasar uang, dan obligasi jangka pendek di bawah setahun.

2. Asuransi

Setelah mulai mencicil tabungan dana darurat, Anda bisa beranjak untuk urutan terpenting kedua yaitu Asuransi. Asuransi penting untuk mengelola risiko keuangan yang lebih besar dan sulit ditanggulangi dengan dana darurat saja.

Sebagai contoh, risiko sakit dan dirawat di rumah sakit, seringkali menguras biaya tidak sedikit. Asuransi bisa melakukan peran untuk hal itu secara lebih baik dengan menutup pengeluaran rumah sakit.

3. Investasi

Setelah memiliki dana darurat dan asuransi, Anda dapat mengalokasikan pendapatan untuk investasi. Investasi berarti menempatkan sejumlah dana di sebuah instrumen tertentu yang berpotensi tumbuh di atas laju inflasi sehingga dana yang ditempatkan semakin berkembang dan membantu akumulasi kekayaan lebih cepat.

Putuskan investasi melalui strategi yang tepat dengan tujuan keuangan yang spesifik, misalnya, untuk persiapan dana pendidikan anak, persiapan dana pensiun, kebutuhan dana pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Beberapa instrumen investasi yang bisa ditimbang di antaranya reksa dana, saham, dan obligasi.

Sesuaikan pemilihan instrumen investasi berdasarkan target waktu pemakaian dana serta profil risiko Anda. ●





Pembiayaan Nikah Lewat Pembiayaan Multiguna

Banyak pasangan muda menunda pernikahan karena terkendala biaya. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa meredam keinginan menggelar pesta pernikahan impian. Mereka yang memiliki aset mungkin akan menjualnya demi membiayai pesta pernikahan yang tak murah.

Untuk sebuah pesta pernikahan, tiap pasangan bisa saja menghabiskan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Uang dalam jumlah tak sedikit itu biasa digunakan untuk kebutuhan catering, baju pengantin, dekorasi, hingga suvenir.

Mengingat biaya yang harus dikeluarkan untuk mendanai pesta pernikahan tidak sedikit, fasilitas pembiayaan multiguna bisa menjadi alternatif untuk dana menikah. Pembiayaan multiguna atau sering juga disebut pinjaman dengan jaminan merupakan alternatif bagi seseorang yang membutuhkan

dana cepat dalam jumlah dan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif.

Pembiayaan multiguna menurut POJK No. 35/POJK.05/2018 adalah pembiayaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

Produk tersebut merupakan hasil perluasan cakupan jenis pembiayaan oleh OJK pada akhir 2014. Saat itu, otoritas menerbitkan POJK No.29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Lewat regulasi tersebut, perusahaan pembiayaan dapat membiayai berbagai macam produk dan jasa baru berupa investasi, modal kerja, dan multiguna. Adapun, sebelumnya hanya meliputi pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan kartu kredit.

Ada sejumlah kelebihan pembiayaan multiguna, salah satunya adalah plafon atau limit pinjaman yang tinggi, di rentang Rp2 juta hingga Rp2 miliar. Dengan adanya jaminan aset berharga, lembaga keuangan mengurangi risiko kerugian jika nasabah gagal bayar.

Selain itu, pembiayaan multiguna memiliki tenor panjang. Lantaran, mesti menjaminkan aset berharga, lembaga keuangan umumnya menawarkan batas waktu pembayaran maksimal 5 sampai dengan 10 tahun.

Dana melalui pembiayaan multiguna juga lebih besar dibandingkan dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) karena nilai aset yang dijaminkan. Alhasil, dana bisa digunakan untuk berbagai konsumtif lainnya.

Di sisi lain, pembiayaan multiguna juga memiliki risiko. Apabila peminjam gagal melunasi, aset berharga yang jadi jaminan bakal disita. Selain itu, karena aset yang dijaminkan bernilai besar, proses pembiayaan juga tidak secepat KTA, sebab lembaga keuangan perlu memeriksa apakah aset yang dijaminkan sesuai dengan kriteria dan persyaratan.

Oleh sebab itu, para pengguna perlu memahami fitur dan persyaratan produk pinjaman multiguna. Pahami bunga, tenor, hingga denda yang harus dibayarkan ketika telah mendapatkan pembiayaan. Sepatutnya, jumlah dana yang dipinjam juga harus sesuai dengan kemampuan, ya! ●





Perkembangan Regulasi Robot *Trading* di Pasar Saham

Kemajuan teknologi turut merambah ke industri pasar modal. Salah satunya robot *trading* yang membantu investor mengambil keputusan investasi.

Melihat perkembangan tren tersebut, PT Bursa Efek Indonesia menggodok aturan terkait dengan penggunaan robot *trading* di dalam aplikasi investasi yang disediakan perusahaan efek atau sekuritas.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo, mengatakan, saat ini Bursa telah memperbolehkan perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB) untuk menggunakan fitur *automated ordering* (pesanan otomatis).

Fitur otomatisasi tersebut termasuk DMA atau *Direct Market Access* dan/atau algoritma *trading* yang lebih dikenal sebagai robot *trading*.

“Namun, hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana pola penyampaian order secara elektronik yang akan digunakan

kepada Bursa dan baru dapat digunakan setelah mendapat persetujuan Bursa,” jelas Laksono, Senin (11/10/2021).

Kemudian, Bursa akan mengevaluasi penyampaian order pada fitur *automated ordering* tersebut dalam rangka mitigasi praktik manipulasi pasar.

Laksono mengungkapkan, saat ini bursa sedang menyempurnakan aturan terkait dengan penggunaan robot *trading* ini dalam peraturan III-K tentang fasilitas pesanan langsung dan/atau penerapan *automated ordering*.

Aturan baru tersebut nantinya akan dilengkapi dengan panduan teknis terkait dengan penggunaan robot *trading* di pasar saham.

Laksono memaparkan pengaturan dalam panduan tersebut mencakup mekanisme penyampaian order dan ketentuan bahwa order tersebut tidak boleh memanipulasi pasar.

Selanjutnya, juga diatur mengenai pelaksanaan manajemen risiko AB termasuk tanggung jawab dan kewajiban bagi broker untuk

melakukan pemantauan terhadap order yang bersifat otomatis.

“Serta kewajiban AB memiliki PIC [penanggung jawab] yang melakukan pemantauan tersebut,” papar Laksono.

Salah satu perusahaan efek Anggota Bursa, PT Indo Premier Sekuritas menjelaskan penggunaan robot melalui aplikasi milik perseroan, yaitu IPOT, bertujuan membantu investor dalam strategi *trading*.

Head of Marketing & Retail Indo Premier Sekuritas, Paramita Sari, mengatakan, aplikasi IPOT menggunakan *Auto Trading Machine* (ATM) yang telah dikembangkan sejak 2012.

“Sistem robot *trading* ATM sifatnya membantu. Semua keputusan dan instruksi dari investor yang menentukan,” jelasnya.

Dalam menggunakan robot *trading* IPOT, nasabah tetap memilih sendiri saham yang akan dijual-dibeli pada harga yang telah ditentukan. Adanya peringatan dari robot bertujuan agar nasabah tidak kehilangan momen untuk mentransaksikan sahamnya. ●



iB Vaganza 2021:

OJK Perluas Edukasi Keuangan Syariah

OJK menyelenggarakan serangkaian kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah bertajuk Islamic Banking (iB) Vaganza pada Oktober 2021.

Acara iB Vaganza terbagi dalam tiga kegiatan besar, yaitu *podcast* series iB Vaganza, iB Vaganza Challenge, dan Pameran Virtual FinEXPO Bulan Inklusi Keuangan.

Podcast series iB Vaganza merupakan serial webinar empat episode yang membahas terkait produk dan layanan jasa keuangan syariah melalui aplikasi Zoom serta disiarkan secara *live* di YouTube Sikapiuangmu OJK.

Kegiatan dikemas dengan konsep *edutainment* dan inklusif, bahkan difasilitasi juru bicara bahasa isyarat. Webinar tersebut juga disemarakkan dengan penampilan grup musik akustik.

Podcast pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 dengan tema “Keberkahan Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Umat”.

Podcast kedua dilaksanakan pada hari Senin, 11 Oktober 2021 dengan

tema “Tabungan dan Pembiayaan Syariah: Solusi Masa Depan Cerdas”.

Podcast ketiga dilaksanakan pada hari Senin, 18 Oktober 2021 dengan tema “Investasi Halal dan Berkah Bersama Perbankan Syariah”.

Podcast keempat dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Oktober 2021 dengan tema “Teknologi Digital Perbankan Syariah, Sama Praktis dan Modernnya”.

Sejumlah narasumber dalam *talkshow* di antaranya Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Nyimas Rohmah; Direktur Utama Bank PT BJB Syariah Tbk., Indra Falatehan; dan Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk., Anton Sukarna.

Sementara itu, iB Vaganza Challenge merupakan perlombaan yang diselenggarakan selama periode Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2021 dengan 4 kategori perlombaan yaitu *Short Video Challenge*, *Vlog Challenge Dewasa*, *Vlog Challenge Anak-Anak*, dan *Cover Jingle OJK Challenge*.

Adapun, selama periode Pameran Virtual FinEXPO Bulan Inklusi Keuangan tanggal 1-31 Oktober 2021, terdapat enam pencapaian dari sisi keuangan syariah.

Pertama, pembukaan rekening/polis/*Single Investor Identification* (SID) bank syariah sebanyak 99.603 rekening dengan nominal Rp5,01 triliun. *Kedua*, jumlah penyaluran kredit/pembiayaan bank syariah sebanyak 4.569 rekening dengan nominal Rp3,17 triliun.

Ketiga, pembukaan rekening/polis/SID koperasi LKM syariah dan lembaga pembiayaan syariah sebanyak 12 rekening dengan nominal Rp 651,94 juta. *Keempat*, penyaluran kredit/pembiayaan koperasi LKM syariah sebanyak 12 rekening dengan nominal Rp266,75 juta.

Kelima, pembukaan rekening/polis/SID asuransi syariah sebanyak 600 rekening dengan nominal Rp4,42 miliar. *Keenam*, pembukaan rekening/polis/SID dana pensiun syariah sebanyak 83 rekening dengan nominal Rp1,48 miliar. ●



Wakaf Saham: Investasi sekaligus Ibadah dan Berbagi

Instrumen pasar modal kian berkembang dan semakin bervariasi, salah satunya dengan hadirnya kategori saham syariah. Dengan berinvestasi di saham syariah, investor bukan hanya sekedar menuai keuntungan, tetapi juga dapat memanfaatkan layanan wakaf saham.

Wakaf sendiri berarti sedekah jariah, yaitu menyumbangkan sebagian harta yang dimiliki untuk digunakan bagi kepentingan masalahat umat. Wakaf merupakan salah satu amalan ibadah yang termasuk istimewa, karena pahala wakaf akan terus mengalir walaupun telah meninggal dunia sesuai hadis Rasulullah SAW.

Lantas, apa itu wakaf saham?

Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar modal dan termasuk dalam aset bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan

harta lainnya, tetapi yang berbeda adalah harta yang diwakafkan, yaitu saham.

Namun, perlu diperhatikan tidak semua saham di pasar modal dapat diwakafkan. Saham yang bisa diwakafkan yaitu saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Selain mewakafkan seluruh saham syariah, objek wakaf juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham syariah, baik *capital gain* ataupun dividen.

Aset wakaf baik saham atau keuntungan investasi akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf (*nadzir*). Nantinya, aset wakaf akan digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat (*mauquf alaih*).

Regulasi mengenai wakaf sudah diatur dalam PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Dalam Peraturan

Menteri No.73 Tahun 2013 juga sudah disebutkan tentang cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Begitupun mengenai wakaf uang sudah disebutkan dalam Fatwa MUI.

Investor yang ingin mewakafkan sahamnya harus memiliki akun di perusahaan efek atau sekuritas. Nadzir yang akan mengelola wakaf saham tersebut juga harus memiliki akun di sekuritas tersebut.

Perusahaan efek atau broker saham fungsinya sebagai pihak yang mewakili *nadzir* untuk menerima wakaf saham dan mewakili investor untuk menyerahkan wakaf saham tersebut. Transaksi yang terjadi adalah investor bertemu dengan *nadzir*, tetapi diwakili oleh broker.

Apabila wakaf saham yang dikelola oleh *nadzir* sudah besar, maka *nadzir* bisa membentuk pengelola investasi dan harus memenuhi syarat khusus. Hasil dari pengelolaan itu akan disalurkan penerima manfaat atau menjadi program produktif yang masalahat untuk umat.

Dengan demikian, aset dari wakaf tidak akan hilang, malah akan berkembang nilainya dalam bentuk saham. ●



Inovasi Digital Sektor Keuangan

OJK terus mendorong pengembangan inovasi dalam satu ekosistem keuangan digital secara terintegrasi guna mengakselerasi transformasi digital di sektor keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan bahwa otoritas berfokus pada dua hal strategis untuk memberikan layanan dan produk kepada masyarakat dengan cepat, murah, sekaligus kompetitif.

"OJK memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat yang *unbankable* dan para pelaku UMKM untuk dapat menikmati produk dan layanan keuangan digital," kata Wimboh dalam acara OJK Virtual Innovation Day pada Oktober 2021.

Kebijakan OJK Percepat Transformasi Digital di Sektor Keuangan

Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan. Dilakukan melalui optimalisasi *regulatory sandbox* dan *OJK Infinity*, serta mendukung inovasi produk, jasa, dan model bisnis oleh LJK termasuk melalui transformasi digital.

Mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital, antara lain terkait dengan standar tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi, serta kerja sama antarpihak dalam keuangan digital.

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor jasa keuangan seiring dengan perkembangan industri digital. Hal itu dilakukan dengan menyediakan sertifikasi dan beragam program peningkatan kapasitas bagi pegawai maupun pimpinan lembaga jasa keuangan.

Penerbitan Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan merubah pola pikir SDM SJK seiring dengan pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis yang dinamis.

Memperkuat peran riset untuk mendukung inovasi dan transformasi digital sektor jasa keuangan. Hal itu dengan mengeksplorasi pemanfaatan teknologi baru dalam produk, jasa, dan model bisnis keuangan ataupun dalam pengembangan metode pengawasan sektor jasa keuangan.

Mengakselerasi penerapan pengawasan berbasis IT (*Suptech*) di OJK dan pemanfaatan *Regtech* oleh lembaga jasa keuangan. *Suptech* mendorong kinerja otoritas ke arah data driven dengan tetap memperhatikan tingkat kompleksitas, ukuran, dan kesiapan serta perkembangan industri jasa keuangan yang diawasi.

Melakukan *Business Process Reengineering* untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan. OJK mengembangkan perizinan terintegrasi berbasis teknologi, otomatisasi pelaporan, dan peningkatan kualitas pengawasan lewat data lembaga jasa keuangan terintegrasi.



Potensi Ekonomi Digital Indonesia

Indonesia Bisa Menjadi Raksasa Digital dan Ekonomi Terbesar Dunia ke-7

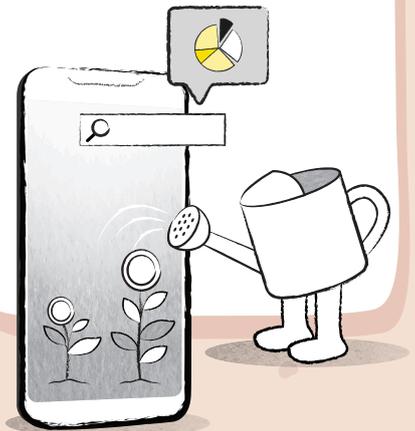
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, serta berpotensi menjadi ekonomi terbesar dunia ke-7 pada 2030. Perekonomian berbasis digital di Indonesia terus berkembang, mulai dari sektor perbankan, asuransi, hingga *financial technology* (*fintech*).

7 Unicorn dan 2 Decacorn Indonesia Rambah Pasar ASEAN

Hingga saat ini sudah terdapat 2.100 perusahaan rintisan di Indonesia, yang di antaranya terdapat 7 unicorn dan 2 decacorn yang telah merambah ke pasar ASEAN.

Tumbuhnya berbagai perusahaan rintisan di sektor-sektor prioritas

Adanya kemudahan komunikasi, perubahan preferensi, dan perilaku masyarakat ke arah digital yang mendorong tumbuhnya perusahaan rintisan di sektor prioritas, seperti sektor keuangan (*fintech*), kesehatan (*healthtech*), pertanian (*agritech*), dan pendidikan (*edutech*).



8 Jurusan OJK Dukung UMKM Bangkit dari Pandemi

Pandemi Covid-19 yang melanda dua tahun terakhir memberikan tekanan terhadap perkembangan ekonomi global, termasuk Indonesia. Sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian pun tak luput dari dampak pandemi. Penurunan pendapatan dan omzet, kegiatan operasional, hingga pengurangan tenaga kerja terjadi di sektor ini. OJK pun menyatakan komitmennya untuk terus melahirkan sejumlah kebijakan yang mendukung kebangkitan sektor UMKM. "Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terdampak pandemi. OJK berkomitmen penuh mendukung pemulihan serta mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan di sektor keuangan," ujar Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso.

Berikut 8 program OJK untuk mendorong UMKM bangkit:

1. Membantu UMKM Bertahan

OJK mengeluarkan kebijakan pre-emptive melalui restrukturisasi kredit dan pembiayaan agar UMKM dapat bertahan di masa pandemi melalui POJK 11 dan POJK 48 tahun 2020.

2. Mendorong Pengembangan UMKM dalam

Satu Ekosistem Digital OJK mengintegrasikan proses dari hulu ke hilir dengan membentuk Skema KUR Klaster, di antaranya Kartu Petani Berjaya (Lampung), KUR Klaster Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, KUR Klaster Jaring (Malang).

3. OJK mengembangkan Bank Wakaf Mikro (BWM)

yang berbasis digital untuk mendukung pembiayaan UMKM melalui Kumpi (Kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren) yang disertai dengan pendampingan kepada 61 BWM, 477.000 nasabah sebesar Rp72,2 miliar total pinjaman per 21 September 2021.

4. Membuka akses *fintech peer-to-peer lending* dan *securities crowdfunding* (SCF)

sebagai alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan terjangkau, khususnya bagi kalangan generasi muda dan UMKM yang belum *bankable*.

5. Membangun *platform* pemasaran UMKMMU

untuk memasarkan produk unggulan UMKM dari seluruh daerah, dan sebagai media untuk meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM kepada 1.125 UMKM dengan 1.412 Produk Unggulan di *platform* UMKM.

6. Melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

untuk perluasan inklusi keuangan di daerah-daerah. Terdapat 326 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 292 TPAKD tingkat kabupaten/kota per 8 Desember 2021.

7. Memperluas Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh pada entitas kredit informal atau ilegal.

8. Mengimplementasikan program kerja *Business Matching* oleh Kantor Regional/Kantor OJK

untuk mempertemukan UMKM dengan sumber pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.



Meriahkan HUT Ke-10, OJK Berbagi Ilmu Lewat Kegiatan OJK Mengajar

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-10 pada tahun ini, OJK kembali mengadakan kegiatan edukasi yang dapat diikuti masyarakat melalui Youtube, yaitu OJK Mengajar dengan tema "Peneguhan Cinta Tanah Air dan Semangat Pengabdian OJK".

Acara ini menjadi media belajar bersama Anggota Dewan Komisiner OJK dan narasumber baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

OJK Mengajar diadakan sepanjang September-November 2021 dan terbagi menjadi delapan sesi dengan tema yang berbeda dan dapat disaksikan secara *Live Streaming* di YouTube Jasa Keuangan (OJK TV) dan Zoom. Tema yang dihadirkan beragam dan menarik, dari peranan OJK dalam pemulihan ekonomi nasional hingga panduan bijak berinvestasi bagi masyarakat.

Kedelapan sesi OJK Mengajar yaitu:

OJK Mengajar Seri Pertama

Bertemakan "Pencegahan Penyauapan di Industri Jasa Keuangan". Menghadirkan:

- Ahmad Hidayat, Anggota Dewan Komisiner OJK
- Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK
- Hidayat Prabowo, Deputi Komisiner ARK OJK

Tanggal: Selasa, 21 September 2021
Waktu: 09.00-12.00 WIB

OJK Mengajar Seri Kedua

Bertemakan "Perkembangan Inovasi Keuangan Digital dan Waspada Investasi Ilegal di Indonesia".

Menghadirkan:

- Nurhaida, Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
- Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., Rektor Universitas Indonesia

Tanggal: Kamis, 7 Oktober 2021
Waktu: 10.00-12.00 WIB

OJK Mengajar Seri Ketiga

Bertemakan "Peluang, Tantangan, dan Peranan OJK dalam Penerapan Teknologi Informasi di Industri Keuangan Non-Bank".

Menghadirkan:

- Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK
- Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA, Rektor Universitas Trisakti

Tanggal: Senin, 18 Oktober 2021
Waktu: 09.00-11.30 WIB

OJK Mengajar Seri Keempat

Bertemakan "Transformasi Perbankan di Era Digital". Menghadirkan:

- Heru Kristiyana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK
- Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum., Rektor Universitas Diponegoro

- Aviliani, Pengamat Ekonomi
Tanggal: Jumat, 22 Oktober 2021
Waktu: 09.00-11.30 WIB

OJK Mengajar Seri Kelima

Mengusung tema "Dampak Pandemi terhadap Perekonomian dan Sistem Keuangan, Serta Peran OJK dalam Pemulihan Ekonomi Nasional"

Narasumber:

- Ahmad Hidayat, Anggota Dewan Komisiner OJK
- Prof. Candra Fajri Ananda, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

Tanggal: Jumat, 12 November 2021
Waktu : 08.30-11.00 WIB

OJK Mengajar Seri Keenam

Dengan tema "Bijak Berinvestasi di Pasar Modal bagi Investor Pemula" Narasumber:

- Tirta Segara, Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK
- Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Keynote Speech:

- Prof. Dr. Rina Indiasuti, Rektor Universitas Padjadjaran
- Tanggal: Kamis, 18 November 2021
Waktu: 10.00 - 12.00 WIB

OJK Mengajar Seri Ketujuh

Bertemakan "Kebijakan Strategis OJK di Masa Pandemi untuk Mempercepat Pemulihan Nasional" bersama:

- Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK
 - Prof. Dr. Edi Noersasongko, Rektor Universitas Dian Nuswantoro
- Tanggal: Kamis, 18 November 2021
Waktu: 13.00-15.45 WIB

OJK Mengajar Seri Kedelapan

Mengusung tema "Sinergi Pemerintah, BI, dan OJK dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional", bersama:

- Suahasil Nazara, Anggota Dewan Komisiner OJK Ex-Officio Kementerian Keuangan
- Dody Budi Waluyo, Anggota Dewan Komisiner OJK Ex-Officio Bank Indonesia

Keynote Speech:

- Teguh Dartanto, Ph.D, Dekan FEB Universitas Indonesia
- Tanggal: Jumat, 19 November 2021
Waktu: 09.30-11.40 WIB ●



OJK Gencar Edukasi dan Literasi Keuangan, Sasar UMKM hingga Petani



Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak setahun lalu, tak menyurutkan langkah OJK melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut tetap didorong, baik melalui tatap muka maupun *online*.

Langkah itu guna mengejar target inklusi keuangan yang dipasang Presiden Joko Widodo sebesar 90% pada 2024. Berdasarkan survei OJK pada 2019, indeks inklusi keuangan baru mencapai 76,19%. Untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, dibutuhkan peningkatan literasi keuangan di masyarakat.

Pada tahun ini, regulator fokus melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada empat segmen prioritas. Mereka adalah pelaku UMKM, perempuan atau ibu rumah tangga, petani atau nelayan, dan masyarakat daerah 3T (Terluar, Tertinggal, Terdepan).

Keempat segmen itu menjadi sasaran prioritas bukan tanpa alasan. Edukasi dan literasi kepada UMKM dinilai mendesak karena

sektor ini memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional. UMKM juga harus didukung dengan literasi keuangan maupun literasi keuangan digital serta akses keuangan yang baik.

Lebih lanjut, segmen perempuan atau ibu rumah tangga tercatat memiliki indeks keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Segmen ini juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan literasi keuangan keluarga.

Kegiatan edukasi dan literasi keuangan juga menasar petani dan nelayan, serta masyarakat daerah 3T yang dilakukan secara tatap muka. Segmen ini menjadi prioritas agar tidak terjadi *Financial Literacy Exclusion* mengingat pada 2020 kegiatan literasi dilakukan secara virtual.

Sepanjang tahun ini, sedikitnya 549 kegiatan edukasi digelar oleh OJK meliputi *Training of Trainers*, *Instagram Live*, *talk show* radio, kontes keuangan syariah, maupun edukasi melalui media sosial @sikapiuangmu dan pengadaan iklan layanan masyarakat.

Materi yang disampaikan mencakup tugas dan fungsi OJK, waspada terhadap penawaran investasi ilegal dan pinjaman *online* ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk keuangan konvensional maupun syariah.

Selain itu, edukasi keuangan juga dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan akbar. Tercatat ada empat *event* besar yang digelar OJK untuk edukasi dan literasi keuangan.

Pada April 2021, OJK menggelar Gebyar Safari Ramadhan berupa webinar, *podcast*, dan kompetisi keuangan syariah untuk meningkatkan literasi keuangan syariah.

Selanjutnya, OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyelenggarakan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) berupa webinar edukasi pasar keuangan pada Agustus 2021. Kegiatan tersebut bertema “Menjadi Investor di Negeri Sendiri”.

Sementara itu, edukasi dan literasi keuangan syariah dilakukan melalui penyelenggaraan *iBVaganza* pada Oktober 2021. Kegiatan tersebut menyemarakkan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2021.

Pada bulan yang sama, OJK juga menyelenggarakan *World Investor Week 2021* yaitu serangkaian kegiatan literasi dan edukasi keuangan di sektor pasar modal. Terakhir, pada Desember 2021, OJK meluncurkan Buku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin, Strategi Nasional Literasi Keuangan tahun 2021-2025, dan *Learning Management System*. ●



Menggendeng raksasa teknologi GoTo, OJK merilis Program Kampus UMKM Bersama di GoTo UMKM Center, Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah pada 30 September 2021.

Kolaborasi keduanya merupakan wujud dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam pengembangan UMKM.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar sebagai ruang pertumbuhan dan pengembangan dalam hal literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi. OJK akan terus mendorong pemanfaatan teknologi bagi pengembangan UMKM.

“Kampus UMKM Bersama sebagai wujud pembinaan kepada UMKM, terutama agar dapat *onboarding* pada ekosistem digital *e-commerce* dan produk-produknya lebih kompetitif dalam upaya membangkitkan UMKM secara bersama-sama,” katanya.

Acara peluncuran Kampus UMKM Bersama dihadiri oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka; Deputy Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah; Pimpinan GoTo Group; dan perwakilan pelaku UMKM serta diikuti secara virtual oleh media.

Wimboh menuturkan dalam mempercepat pertumbuhan UMKM pasca pandemi, diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM yang dilakukan secara *end-to-end* dalam satu ekosistem terintegrasi berbasis teknologi yang mencakup penguatan kualitas manajemen, kualitas produk, akses pasar dan pembiayaan, kapasitas SDM, dan adaptasi penguasaan teknologi digital.

Hal inilah yang melatarbelakangi OJK untuk menginisiasi dan meluncurkan Program Kampus

Kampus UMKM Bersama, Bangkitkan Usaha Rakyat



UMKM Bersama yang melibatkan seluruh *stakeholders*, di antaranya perusahaan *start-up* dan universitas untuk meningkatkan produktivitas, inovasi produk dan mendorong perbaikan daya saing UMKM di tingkat global.

Kampus UMKM Bersama, katanya akan mengedepankan 5 fokus dalam mempersiapkan UMKM Go Global, yaitu program edukasi yang berkesinambungan, penyaluran pendanaan, pemasaran *online*, sistem pembayaran dan logistik, serta penyaluran program unggulan berbasis ekspor.

Lokasi pelatihan untuk kolaborasi pertama Kampus UMKM Bersama ini akan berpusat di GoTo UMKM Center, Solo Technopark.

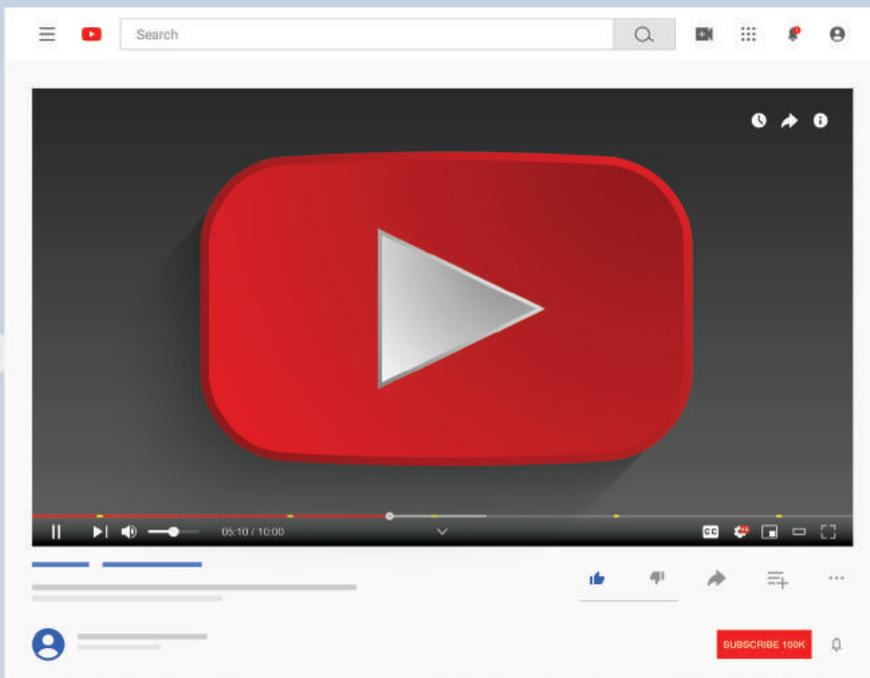
GoTo, sebagai mitra pertama OJK dalam Program Kampus UMKM Bersama, menargetkan keikutsertaan *merchant* UMKM dengan produk unggulan daerah, seperti misalnya *merchant* Batik

untuk Kampus UMKM Bersama OJK-GoTo di Solo.

OJK akan mendorong agar setidaknya terdapat 5 pengrajin batik di kota Surakarta dapat menyalurkan produk unggulannya menuju *go global* atau pasar ekspor pada 2022.

Kampus UMKM bersama juga akan menyediakan kurikulum vokasi yang akan memberikan program pengajaran dan pelatihan secara langsung mengenai pengembangan bisnis secara digital, serta membuka kesempatan bagi para civitas akademika (lulusan PTN/PTS terkait) dalam melakukan program magang di perusahaan teknologi atau *startup unicorn*.

Mengingat program ini bersifat kolaboratif, maka dalam pelaksanaan implementasi Kampus UMKM Bersama, OJK melibatkan peran aktif dari Kantor Regional dan Kantor OJK di setiap provinsi atau daerah. ●



Fenomena Kampung Youtuber di Bondowoso, Jawa Timur

Deret mobil mewah berjejal di jalanan sempit di Dusun Posong, Bondowoso, Jawa Timur. Mobil-mobil keluaran terbaru itu merupakan milik dari para pemuda setempat, yang berhasil membuka keran penghasilan melalui *platform* YouTube.

Dusun Posong, Bondowoso, kini dikenal sebagai Kampung Youtuber. Bukan tanpa alasan, melainkan karena sebagian besar pemuda di dusun tersebut merupakan *content creator* untuk *platform* YouTube. Lewat monetisasi, para pemuda itu mampu meningkatkan taraf ekonomi hingga mampu membeli mobil.

Keberadaan Kampung Youtuber tidak terlepas dari sosok Imam Januar. Dia adalah penggerak bagi para pemuda di Dusun Posong untuk menjadi seorang Youtuber. Tak disangka, upaya yang dilakoniya menemui jalan terang.

Imam memulai karir sebagai Youtuber pada 2017. Saat itu, keadaan ekonominya pas-pasan, ditambah lagi dia mulai jenuh

bekerja sebagai karyawan di salah satu toko baju sejak 2006. Imam lantas putar haluan mencari penghasilan sampingan.

Bermodal jaringan internet, Imam mulai berselancar mencari cara mendapatkan uang lewat dunia maya. Dari hasil penelusurannya di internet, dia mengetahui bahwa membuat konten di YouTube mampu menghasilkan uang.

Imam kemudian mulai belajar membuat konten secara autodidak. Dia pun mulai mencoba membuat video edukatif yang digarap bermodalkan ponsel pintar. Konten yang dipilihnya cukup mudah dan sederhana, misalnya, seperti cara mengobati sakit gigi. Pilihan konten itu dinilai Imam sangat dibutuhkan oleh banyak orang.

Usaha Imam tak sia-sia. Setelah selama enam bulan seringkali melakukan kesalahan, dia akhirnya mampu mendapatkan uang dari YouTube pada bulan kesembilan senilai Rp45 juta.

Tak puas hanya mampu menghasilkan uang untuk diri sendiri,

Imam pun mulai menularkan semangat membuat konten YouTube kepada para pemuda di Dusun Posong. Hal ini, kata Imam, sejalan dengan visi misinya.

“Merasa kurang bermanfaat ketika saya itu hanya mendapatkan penghasilan sendiri dari YouTube,” kata Imam.

Berkat ilmu yang disalurkan oleh Imam, para pemuda di dusun setempat mulai beralih menjadi *content creator*. Jumlah pengangguran di dusun itu perlahan-lahan berkurang karena para pemuda yang baru lulus sekolah bisa langsung bekerja menjadi pembuat konten.

Imam mengatakan bahwa dirinya memiliki tujuan untuk mengangkat Dusun Posong sebagai Kampung Youtuber, sehingga mampu memangkas pengangguran di desanya.

“Alhamdulillah, sekarang sudah hampir pemuda yang baru lulus sekolah itu tidak harus bekerja ke orang lain, tetapi sudah bisa menjadi bos sendiri,” katanya. ●



Awas Investasi Bodong! Simak Ciri–Ciri Surat Izin Palsu Mengatasnamakan OJK

Praktik penawaran investasi ilegal atau bodong saat ini semakin beragam modus dan caranya.

Apalagi, saat pandemi, banyak orang yang ingin berinvestasi karena menahan pengeluaran atau *spending*. Tak sedikit masyarakat yang melupakan legalitas perusahaan yang menawarkan investasi.

Baru-baru ini ditemui penawaran investasi bodong yang dilakukan dengan mengirimkan surat izin palsu yang mengatasnamakan OJK. Surat izin palsu digunakan untuk mengelabui para calon investor.

Atas temuan tersebut, OJK pun meminta masyarakat untuk selalu mengecek keaslian surat izin sebelum memutuskan berinvestasi. Tentunya hal ini bertujuan agar

masyarakat tidak terjebak pada investasi ilegal alias investasi bodong.

“Waspada dan berhati-hatilah ketika mendapat tawaran investasi. Cek dulu keaslian surat izin yang mengatasnamakan OJK yang kamu terima,” tegas OJK dalam pengumumannya.

OJK menjelaskan, setidaknya terdapat 4 ciri surat izin palsu yang kerap kali ditawarkan oleh oknum.

Pertama, jenis dan ukuran *font* atau huruf yang tidak sama atau konsisten dalam satu surat.

Kemudian, surat izin kerap mencantumkan jenis usaha yang tidak berada di bawah pengawasan OJK, seperti *forex*, koperasi simpan pinjam, aset kripto, investasi robot *trading*, hingga emas digital.

“Lalu, surat izin palsu biasanya menduplikasi nama perusahaan

yang legal namun menggunakan alamat palsu,” jelas OJK.

Terakhir, surat izin palsu juga mencantumkan QR *code* palsu yang tidak bisa dipindai atau tidak mengarah ke situs OJK.

Masyarakat pun diminta untuk memastikan keaslian surat izin OJK dengan cara menghubungi Kontak OJK 157 @kontak157 melalui nomor telepon 157, Whatsapp 081 157 157 157, atau surat elektronik (*e-mail*) konsumen@ojk.go.id.

Selain itu, masyarakat bisa memastikan legalitas dan identitas sebuah tawaran investasi telah sesuai, dengan mengunjungi *website*, akun resmi media sosialnya, nomor telepon, alamat, ataupun *e-mail*.

“Ingat perusahaan yang berizin OJK dilarang menawarkan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen,” tutup OJK. ●



Waspada Investasi Bodong Berkedok Robot *Trading*

Inklusi keuangan yang terus meluas di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masa pandemi telah mendorong kenaikan aktivitas transaksi investasi, baik berupa mata uang (*forex*), saham, maupun aset kripto.

Namun, minat investasi masyarakat yang meningkat itu juga membawa peluang bagi para oknum pelaku investasi bodong. Belakangan ini, modus penipuan berseliweran dengan tajuk robot *trading* ilegal.

Adapun, robot *trading* sebenarnya menawarkan kemudahan bagi penggunaannya. Kendati demikian, pengguna yang tak memiliki pengetahuan yang cukup justru bisa terjebak penipuan berkedok investasi.

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing mengingatkan agar investor tidak fokus pada robot *trading* karena teknologi tersebut dimaksudkan

hanya untuk memudahkan transaksi perdagangan.

“Beberapa hal yang perlu diketahui adalah bahwa keputusan investasi untuk jual atau beli harus berasal dari investor, bukan pihak lain,” tutur Tongam.

Belakangan ini, penggunaan robot *trading* menarik minat masyarakat yang kurang berhati-hati dalam investasi perdagangan berjangka komoditas valuta asing (*forex*). Pasalnya, robot *trading* di perdagangan *forex* memberikan penawaran kemudahan untuk mendapatkan keuntungan pasti.

Singkatnya, investor menjadi tidak perlu menganalisa secara teknikal, fundamental, dan tidak ada teknik yang harus dipelajari dalam investasi dengan robot *trading*.

Hingga 3 November 2021, setidaknya Satgas Waspada Investasi OJK telah menutup 6 kegiatan *forex*, aset kripto, dan robot *trading* tanpa izin.

Tongam melanjutkan bahwa masyarakat yang ingin menggunakan robot *trading* dalam berinvestasi seyogyanya harus lebih paham dan sudah memahami mekanisme *trading*.

Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra memaparkan terdapat beberapa keuntungan dan kerugian penggunaan robot *trading* di dalam investasi *forex*. Di satu sisi, robot memberikan kemudahan yang membuat *trader* tidak perlu menganalisis produk maupun pasar karena sudah dikerjakan secara otomatis.

Namun, robot *trading* yang terotomasi dapat menghilangkan emosi manusia dalam menyusun strategi saat *trading*. Seperti diketahui, strategi dalam berinvestasi oleh setiap orang berbeda-beda yang dilakukan dengan disiplin diri masing-masing.

Tak hanya itu, kekurangan penggunaan robot *trading* di dalam investasi juga terletak pada investor tidak memiliki kendali atas aktivitas robot tersebut. “Kita tidak bisa menghentikan robot ketika transaksi mengalami kerugian terus-menerus,” ujar Ariston.

Untuk dapat terhindar dari modus penipuan terutama dari *platform* robot *trading* ilegal, masyarakat juga harus proaktif mengecek perizinan dari robot *trading* tersebut ke kementerian atau lembaga terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Perdagangan Sektor Komoditi Berjangka (Bappebti).

Pasalnya, *platform trading* yang menyediakan layanan robot *trading* tanpa izin bisa menggiring investor ke kerugian yang lebih besar. Oknum ilegal di industri keuangan biasanya berpotensi melakukan tindak pidana perdagangan, melanggar perlindungan konsumen, dan bahkan mempraktikkan tindak pidana pencucian uang. ●



Kenali Perbedaan Pinjaman di *Fintech P2P Lending* dan BPR

Seiring dengan perkembangan teknologi, akses keuangan masyarakat pun semakin terbuka. Salah satu inovasi keuangan digital yang sedang naik daun saat ini adalah *fintech peer-to-peer lending* (P2P) atau akrab disebut pinjaman *online*.

Pinjaman *online* memiliki karakteristik mudah dan cepat pencairannya melalui *platform* digital, yaitu aplikasi yang dapat diunduh dan dipasang di telepon pintar.

Namun, tak hanya ke pinjaman *online*, masyarakat atau pelaku UMKM juga dapat mengakses pendanaan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang juga relatif cepat pencairan dananya. Masing-masing pinjaman memiliki tujuan dan keunggulan.

Di bawah ini akan dibahas mengenai pinjaman *fintech P2P lending* dan BPR. Simak, yuk!

Fintech P2P Lending

Fintech P2P lending merupakan *platform online* yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana (*lender*) untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur (*borrower*) dengan imbal balik (*return*) lebih tinggi.

Melalui *platform* ini, *borrower* bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan proses yang lebih cepat.

Pertumbuhan *fintech P2P lending* saat ini semakin berkembang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang sulit mendapatkan pinjaman dana dan juga para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis.

Bagi para peminjam, manfaat dari *P2P lending* adalah pengajuan pinjaman lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminan.

Namun, perlu diingat bahwa meminjam di *platform P2P* juga ada risikonya, yaitu suku bunga pinjaman yang cukup tinggi dan denda yang harus dibayar jika kita telat membayar. Jadi, pastikan meminjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar, ya!

Tak cuma bagi peminjam, *fintech P2P lending* juga memiliki manfaat bagi *lender*/ pemberi pinjaman. Melalui sistem ini, akan memudahkan *lender* untuk mendiversifikasi pendanaan, sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan.

Jika *lender* sudah mengalokasikan uang melalui *P2P lending*, *lender* tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun kita mau dan ada kemungkinan si peminjam mengalami gagal bayar, sehingga dana yang dipinjamkan memiliki risiko tidak kembali.

Untuk itu, diversifikasi sangat diperlukan agar *lender* tidak hanya menaruh dana pada satu peminjam, tetapi bisa kepada beberapa peminjam lainnya untuk meminimalisir risiko. Apalagi *lender* juga dimudahkan dengan adanya informasi *risk grade* (tingkat risiko) yang ditentukan oleh *platform P2P lending*, sehingga *lender* bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum memberikan pinjaman.





BPR

Mengacu pada UU tentang Perbankan No.10 Tahun 1998, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha BPR tidak seluas bank umum karena BPR ditujukan sebagai institusi keuangan mikro. Oleh karena itu, BPR juga identik sebagai bank yang melayani pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

BPR bisa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, juga memberikan kredit dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Kredit atau pembiayaan BPR memiliki beberapa kelebihan bagi debitur, yaitu:

1. Jenis Jaminan yang Disyaratkan Tidak Sulit

Jaminan atau agunan memang dijadikan salah satu syarat kredit di BPR, tetapi bukan berarti jaminan merupakan syarat utama yang menjadi pertimbangan pemberian kredit.

Pada pinjaman BPR, yang dijadikan pertimbangan utama dalam menyetujui pinjaman adalah prospek usaha jangka panjangnya, alias seberapa besar kemungkinan bisnis debitur akan sukses.

2. Mengutamakan Unsur Kepercayaan

Hal yang menjadi prioritas dari BPR adalah unsur saling percaya. Unsur kepercayaan juga diterapkan pada saat BPR memberikan produk pinjaman kepada nasabah.

BPR akan lebih mudah memberikan pinjaman pada nasabah yang sudah pernah meminjam sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya unsur

percaya bahwa nasabah yang telah memiliki reputasi baik akan tetap mempertahankan kelancaran kreditnya.

3. Memiliki Sistem Pemasaran yang Baik

Dengan visi membantu pengembangan UMKM dari unsur modal, BPR selalu berusaha untuk menjangkau UMKM yang berada di pedesaan atau wilayah terpencil.

Salah satu jenis pemasaran yang kerap dilakukan oleh BPR adalah sistem jemput bola, dengan tujuan menjangkau para nasabah atau calon debitur.

Selain menggunakan sistem jemput bola untuk mencari calon debitur yang sedang membutuhkan pinjaman, sistem keliling pedesaan ini juga digunakannya untuk mengumpulkan uang cicilan dan tabungan.

Cara ini dinilai sangat tepat karena bisa memudahkan warga

desa atau wilayah terpencil untuk melakukan transaksi, meminimalkan jarak, serta meminimalkan biaya transportasi nasabah.

4. Pencairan Dana Cepat dan Mudah

Dengan tujuan BPR untuk menolong permodalan UMKM, maka pencairan dananya dipercepat yaitu hanya sekitar 2 hingga 3 hari kerja.

Setelah seluruh persyaratan dilengkapi dan dipenuhi, maka pihak BPR akan langsung mengecek dan menganalisis data nasabah. Apabila data sudah memadai, survei lapangan akan segera dilakukan untuk melihat usaha yang sedang dijalani oleh calon debitur atau peminjam secara langsung.

Dengan demikian, selama nasabah mengutamakan kejujuran dan tidak memanipulasi data atau informasi apapun, BPR akan dengan mudah memberi pinjaman modal. ●





Bunga *Fintech* P2P Lending Turun 50%

Artis Nafa Urbach belum lama ini menarik perhatian publik setelah mengunggah keresahan soal pinjaman *online* (pinjol) di Instagram *stories* miliknya pada kisaran September 2021.

Dalam unggahannya tersebut, Nafa meluapkan kekesalannya karena mendapatkan teror dari sejumlah pihak penyedia layanan pinjol.

Penelepon menyebut ada rekan Nafa yang meminjam uang dan menjadikan dirinya sebagai jaminan pinjol. Ibu satu anak ini diminta mengabarkan agar peminjam segera membayar tagihannya.

Dari situ, Nafa menasihati publik untuk tidak lagi meminjam uang dari pinjol karena secara perlahan justru akan berdampak buruk.

Sebelum ramai unggahan itu, publik sudah dibuat heboh dengan sederet kasus yang dikaitkan dengan pinjol. OJK pernah menyampaikan ada konsumen yang meminjam ke 40 pinjol berbeda dalam seminggu.

Tak hanya itu, beberapa kasus bunuh diri terjadi karena korban terjerat bunga tinggi pinjol.

Kondisi itu menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo, yang menyoroti pinjol berbunga tinggi. “Saya mendengar, masyarakat bawah banyak yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman *online*, yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya,” ujarnya dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021 pada Senin (11/11/2021).

Selang beberapa hari, Presiden menggelar rapat terbatas membahas tata kelola pinjaman *online*.

Seusai rapat terbatas, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso yang juga hadir meminta penyedia layanan pinjaman *online* dapat memberikan suku bunga lebih murah dan memperbaiki cara penagihan kepada nasabah.

Tak butuh waktu lama, penyedia layanan pinjol legal merespons positif permintaan regulator.

Asosiasi Fintech Pendanaan

Bersama Indonesia (AFPI) sepakat menurunkan bunga pinjaman hingga 50%.

Biaya pinjaman menjadi diturunkan dari maksimal 0,8% per hari menjadi 0,4% per hari.

Penurunan biaya pinjaman ini berlaku sementara selama sebulan bulan dan dikaji lebih lanjut. Hal itu mempertimbangkan efek dari penurunan biaya pinjaman akan cukup signifikan terhadap pelaku industri.

Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi mengatakan, keputusan ini sebagai salah satu upaya agar pinjaman melalui *fintech* P2P *lending* bisa terjangkau dengan skala ekonomis yang lebih murah.

“Sehingga masyarakat bisa benar-benar membedakan antara yang ilegal dengan yang resmi,” ujarnya dalam media *gathering* virtual pada Jumat (22/11/2021).

Wimboh pun mengapresiasi inisiatif asosiasi yang memberlakukan bunga pinjaman lebih murah. OJK akan mendukung dan memfasilitasi upaya penurunan bunga pinjol, sehingga produk yang ditawarkan *fintech* P2P *lending* dapat diterima masyarakat.

Data OJK menunjukkan sampai dengan 17 November 2021, total jumlah penyelenggara *fintech* P2P *lending* berizin dan terdaftar sebanyak 104 penyelenggara. OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara *fintech* P2P *lending* yang sudah terdaftar maupun berizin dari OJK.

Untuk mengecek status izin penawaran produk jasa keuangan, masyarakat dapat menghubungi kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan Whatsapp 081 157 157 157. ●





Layanan Pengaduan Konsumen Kontak OJK 157 selama 2021

Masyarakat yang memiliki masalah terkait dengan layanan jasa keuangan dapat mengadakan hal ini ke Kontak OJK 157.

Melalui Kontak OJK 157, masyarakat juga dapat mencari informasi mengenai layanan jasa keuangan. Sebagai informasi, Kontak OJK 157 disediakan oleh OJK sesuai kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

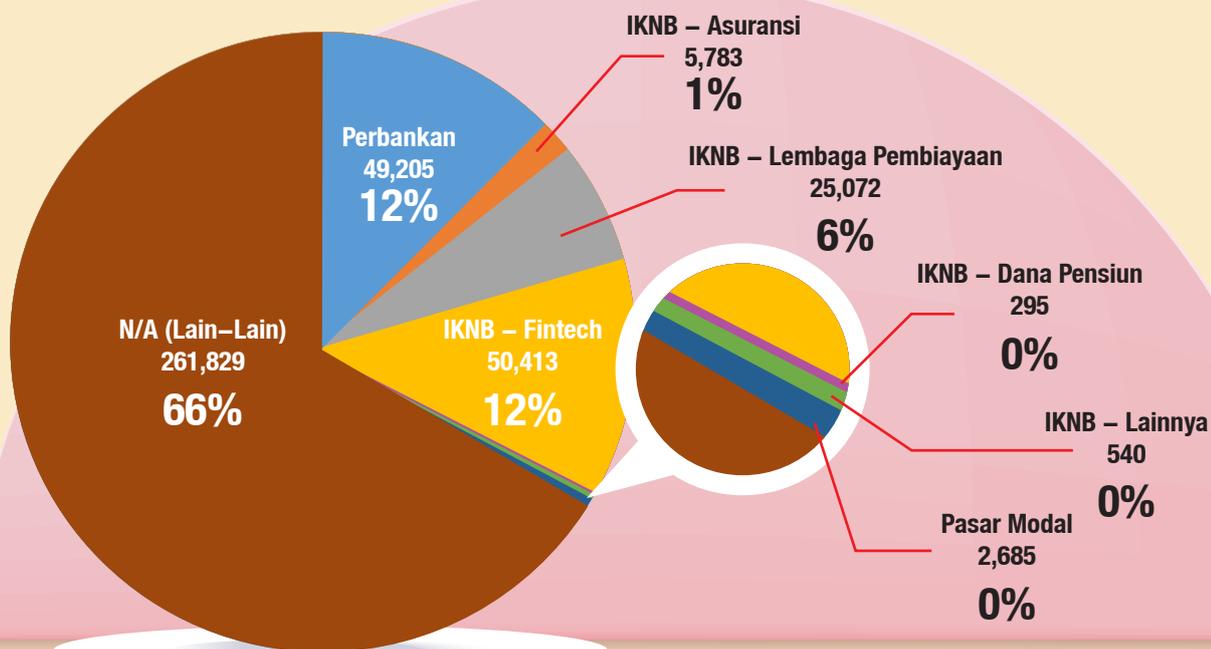
OJK berkomitmen untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dan Konsumen terkait produk dan layanan di sektor jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga menyediakan fasilitas penanganan pengaduan Konsumen agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kontak OJK 157 memiliki 3 layanan berupa:

- Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan)

- Layanan Penerimaan Informasi (Laporan)
 - Layanan Pengaduan
- Sepanjang tahun ini sampai dengan tanggal 25 November 2021 jumlah layanan yang paling banyak masuk melalui kanal Whatsapp yaitu permintaan informasi debitur.

Adapun, berikut rincian data layanan pengaduan konsumen Kontak OJK 157 tersebut:



Layanan Pengaduan yang Masuk Tahun 2021

Whatsapp	288,522	49.71%	Website	11,852	2.04%
SLIK	137,133	23.63%	Letter	7,975	1.37%
E-mail	87,440	15.07%	Walk-in	568	0.10%
Phone Call	46,890	8.08%	Lainnya	6	0.00%

Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, Ekonomi Bergerak Pulih

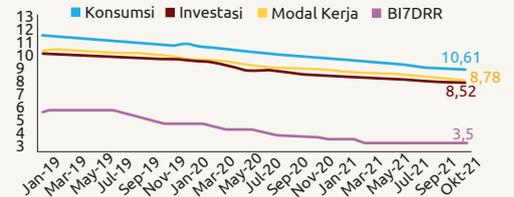
Kondisi sektor jasa keuangan Indonesia dalam kondisi stabil dengan kinerja yang terjaga dan tumbuh positif di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Rapat Dewan Komisiner OJK bulan November 2021 mencatat fungsi intermediasi, baik di sektor perbankan maupun di industri keuangan non-bank,

meningkat. Penghimpunan dana di pasar modal pun terus terdongkrak.

Berikut rincian kinerja industri jasa keuangan terkini. Mari simak!

Perbankan

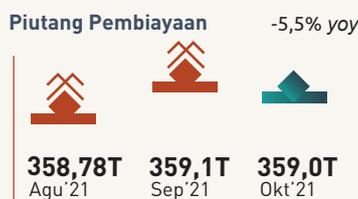
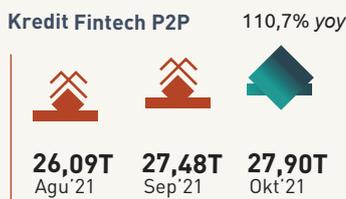


Pasar Modal



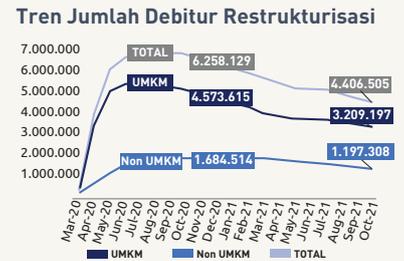
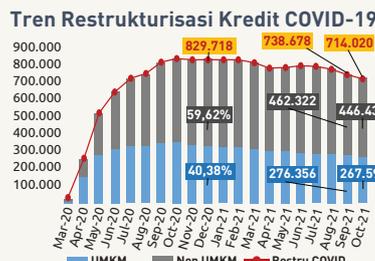
Penghimpunan dana di pasar modal telah meningkat 300,7% dari periode yang sama tahun lalu diiringi dengan penambahan emiten baru. NAB Reksa Dana juga meningkat diiringi pertumbuhan jumlah investor domestik. Selain itu, IHSG juga mengalami pertumbuhan signifikan dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia masih baik.

IKNB



Pertumbuhan Piutang Pembiayaan melalui Perusahaan Pembiayaan per Oktober 2021 masih terkontraksi namun sudah dalam tren perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan pembiayaan terjadi pada penyaluran pembiayaan melalui *peer to peer lending* (P2P Lending) yang tumbuh positif. Penghimpunan premi Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Reasuransi cenderung stabil dibandingkan bulan sebelumnya.

Perkembangan Outstanding Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan



Restrukturisasi kredit Covid-19 dan jumlah debitur di Oktober 2021 terus bergerak turun dengan tren melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Peran restrukturisasi sangat besar menekan tingkat NPL/NPF dari Bank/Perusahaan Pembiayaan sehingga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dengan baik. Dalam rangka mengantisipasi dinamika kebijakan ekonomi global dan domestik, industri perbankan tercatat terus meningkatkan pencadangan kredit (*provisioning*), baik untuk seluruh kategori KBMI dan juga pencadangan terhadap kredit restrukturisasi Covid-19.

Direktur Utama Bank Jago, Kharim Indra Gupta Siregar: Fokus pada *Problem Solving*

Sebagai nakhoda salah satu bank digital yang berdiri paling awal di Indonesia, siapa sangka Kharim Indra Gupta Siregar, merupakan seorang sarjana teknik mesin.

Kecintaannya terhadap dunia teknik berawal sejak usia 8 tahun. Kala itu, Kharim melihat gambar mobil balap Formula Satu (F1) di salah satu majalah anak. Sejak saat itu lah, dia tertarik dengan dunia permesinan dan akhirnya memutuskan kuliah di jurusan teknik mesin.

Usai menempuh pendidikan tinggi, Kharim tidak langsung terjun di dunia perbankan, melainkan bekerja di IBM, salah satu perusahaan teknologi yang menyediakan solusi ke berbagai industri, termasuk ke industri bank.

Ketika bekerja di IBM, Kharim banyak berhubungan dengan klien dari sektor jasa keuangan. Dari sinilah awal mula pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), ini akhirnya berkecimpung di industri perbankan.

Saat ini Kharim menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Bank Jago Tbk. Bank ini sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Artos Indonesia Tbk., yang kemudian bertransformasi menjadi bank digital pada tahun lalu seiring dengan adanya perubahan pemegang saham pengendali.

Salah satu pemegang saham Bank Jago adalah raksasa transportasi daring (*online*) Gojek, melalui bisnis layanan keuangan dan pembayaran digitalnya, yaitu PT Dompot Karya Anak Bangsa atau Gopay.

Walaupun telah lama bekerja sebagai bankir, *passion* Kharim terhadap dunia *engineering* tetap dibawa hingga kini karena dia meyakini bahwa *engineering* pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan *problem solving* atau solusi dari sebuah masalah.

“Pada dasarnya *engineering* itu bukan ilmu pasti, tetapi *it’s all about problem solving*. Misalnya saja dulu dari naik kuda, dibikin kereta, kemudian berkembang menjadi mobil. Itu berawal dari *problem solving*,” katanya.

Dalam karirnya sebagai bankir, Kharim telah menduduki beberapa jabatan penting di dunia perbankan, di antaranya Executive Vice President/Head of Business Support Divisi Danamon Simpan Pinjam, Vice President untuk Electronic Channel & Customer Loyalty Retail Banking Bank Mega, serta Direktur Teknologi Informasi Bank BTPN.

Pria berusia 54 tahun ini kemudian diangkat sebagai Direktur Utama Bank Jago dalam RUPSLB pada 15 November 2019 dan efektif menduduki jabatannya pada 18 Maret 2020.

Dengan berbagai macam posisi yang pernah dijalani selama berkarir di dunia

perbankan, Kharim menyatakan pengalaman tersebut membuatnya tidak hanya berkuat pada sisi teknologi, tetapi juga sudut pandang lainnya.

“Saya pernah di *consumer banking, operation, micro banking*, dan lain-lain. Di situ banyak masalah dan saya melihat bagaimana teknologi itu bisa menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya.





Menurutnya, kemampuan dan *passion* dalam *problem solving* merupakan karakteristik yang penting dalam mendukung transformasi perbankan digital. Apalagi, seorang bankir pada dasarnya telah memiliki kemampuan mengelola risiko (*risk management*).

Dengan teknologi, lanjut Kharim, perbankan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi nasabah dalam mengakses layanan perbankan.

“Saya yakin teknologi itu menyediakan solusi untuk nasabah. Kalau tidak, ya tidak ada nilai tambah,” jelasnya.

Kharim pun menyadari bahwa dalam membangun sebuah bank berbasis digital tidaklah mudah. Selain membangun teknologi yang sulit, mengelola sumber daya manusianya pun jauh lebih menantang karena harus memastikan bagaimana sebuah visi

dan nilai perusahaan benar-benar diterapkan, dipahami, dan dijalankan oleh seluruh organisasinya.

Oleh karena itu, dia berpandangan dalam membangun sebuah bank digital, tidak mungkin seorang direktur utama berdiri sendiri. Harus didukung oleh seluruh pihak, dari pemegang saham hingga karyawan. Jika ingin memberikan sesuatu dengan cepat, lanjutnya, hal ini hanya bisa berjalan secara tim.

“Ini merupakan usaha bersama, *it is not a one man show*,” tegasnya.

Selain memiliki *passion* dalam *engineering*, Kharim juga menyebutkan krisis finansial tahun 1998 merupakan pengalaman yang paling membekas sepanjang karirnya. Hal ini disebabkan saat menghadapi krisis, bankir dipaksa menghadapi kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, bahkan dipercaya tidak akan terjadi.

Kharim mencontohkan, saat krisis finansial melanda Indonesia

bunga interbank harian mencapai 115%. Saat itu, tidak ada sistem bank yang memiliki 3 digit angka untuk bunga karena dipercaya bunga pinjaman tidak akan mencapai level tersebut, terlalu tinggi dan mustahil.

“Mana ada bunga 100%? Namun, nyatanya terjadi. *If you don't talk about tomorrow, the bank will be closed*. Kita bisa belajar banyak dari krisis dan itu tadi, melihat *problem solving*, bagaimana caranya,” ujar Kharim.

Adapun, dalam memimpin Bank Jago, Kharim berprinsip bahwa untuk bisa sukses harus ada nilai yang bisa ditawarkan sebuah bank kepada nasabah. Tak hanya itu, dengan banyaknya pesaing bank digital lain yang muncul di Indonesia, ia pun memegang keyakinan tidak boleh memandangi sebelah mata para kompetitor.

“Jika kamu tidak *respect* ke nasabah dan kompetitor, *you will dead by tomorrow*,” tutup Kharim. ●



CEO Bizhare Heinrich Vincent:

Ajak Masyarakat Menuju *Financial Freedom*



Sejak mengenyam bangku sekolah dasar, Heinrich Vincent telah mengenal dunia bisnis. Berawal dari jualan pulsa hingga dagang di *e-commerce* saat sekolah, kini dia menjadi *Chief Executive Officer* (CEO) *financial technology* (*fintech*) urun dana (*securities crowdfunding*) bernama PT Investasi Digital Nusantara atau dikenal dengan sebutan Bizhare. Adapun Bizhare awalnya berdiri sebagai *equity crowd* dan saat ini telah memperluas usahanya menjadi *securities crowdfunding*.

Umurnya memang masih muda, tetapi pria kelahiran tahun 1994 ini masuk ke penghargaan tahunan bergengsi, yaitu Forbes 30 under 30 tahun 2020, bersama CTO Bizhare, Giovanni Umboh. Tentunya, keberhasilan Vincent dalam memimpin Bizhare menjadikannya masuk ke dalam penghargaan tersebut.

Vincent bercerita bahwa jiwa gemar berbisnis dan berinvestasi yang membawanya membangun Bizhare. Padahal sewaktu kuliah, dia mengambil jurusan arsitek, dengan harapan mendapat pelajaran bisnis properti. Namun, ternyata dia lebih banyak mendapatkan ilmu untuk mendesain bangunan di jurusan ini.

Usai kuliah, Vincent merasa jika membangun karir di bidang arsitek perlu waktu untuk berinovasi. Masalahnya, butuh proses tahunan dari arsitek menggambar desain bangunan hingga melihat wujudnya saat pembangunan rampung.

Selain itu, dengan jiwa investornya, Vincent tetap aktif dalam menanamkan modal di bisnis *minimarket* walaupun modal yang dimiliki tidak besar, dengan sistem patungan bersama teman-temannya. Alasan inilah yang

membuatnya memilih terjun ke dunia teknologi finansial atau *fintech*.

“Kalau investasi, saya bisa dapat *passive income* dan bebas finansial. Selain itu, saya *demen* inovasi dan menciptakan solusi. Di dunia *startup*, inovasi diinisiasi dan bisa cepat terealisasi,” ujarnya saat menjelaskan awal pendirian Bizhare.

Kebebasan finansial atau *financial freedom* merupakan semangat yang ingin ditularkan Vincent kepada masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, banyak anak muda yang belum menyadari pentingnya tabungan masa depan atau persiapan masa pensiun. Dia menyebutkan banyak masyarakat yang tidak memiliki modal untuk berinvestasi.

Di sisi lain, lebih dari 50% UMKM di Indonesia juga tidak punya modal untuk ekspansi. Dari kedua masalah tersebut, Vincent pun terpikir untuk mempertemukan kedua masalah dan memberikan solusi melalui *platform* Bizhare.

“Kami punya visi agar masyarakat bebas finansial dan diharapkan di masa depan masyarakat tidak banyak mengkhawatirkan uang karena bisa didapat dari investasi,” jelasnya.

Ke depan, Vincent menambahkan, edukasi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat lebih melek investasi. Apalagi, *platform crowdfunding* merupakan konsep baru. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai potensi risiko bisnis.

“Walaupun sudah investasi di *brand* bagus, tetap ada potensi risiko. Kebanyakan masyarakat Indonesia kurang paham dan kalau berinvestasi ingin untung besar dengan cepat,” kata Vincent. ●



Segera Ganti! Kartu Kredit dan Debit Harus Menggunakan *Chip*

Ancaman tindak pidana pencurian data pribadi melalui kartu ATM membuat Bank Indonesia (BI) menerbitkan *National Standard Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) sebagai standar nasional teknologi *chip* kartu ATM dan kartu debit sejak 2017.

Penerapan NSICCS pada kartu ATM/Debit diharapkan mampu meningkatkan keamanan bertransaksi, mendorong terciptanya interoperabilitas instrumen sejalan dengan semangat Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan terciptanya efisiensi sistem pembayaran.

Di sisi lain, teknologi NSICCS juga diterapkan tidak hanya pada kartu, tetapi juga pada perangkat ATM, *Electronic Debit Card* (EDC) serta seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi kartu ATM dan atau kartu debit.

Sesuai dengan Surat Edaran BI, implementasi secara penuh kartu ATM dan debit berbasis *chip* ditargetkan selesai pada 31 Desember 2021. Perbankan juga telah memulai pergantian kartu secara bertahap. Bila masa peralihan berakhir, kartu ATM *magnetic stripes* akan diblokir.

Menurut Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, kartu ATM berbasis *chip* memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan kartu ATM berbasis ATM *magnetic stripes*.

Perbedaan yang paling mencolok dari kedua ATM ini adalah teknologi. Kartu ATM berbasis *chip* mempunyai proses autentikasi akses ke jaringan ATM ataupun EDC, sedangkan untuk



kartu ATM berbasis *magnetic stripe* tidak mempunyai proteksi ataupun *password* terhadap data yang ada.

Hal ini menjadikan kartu ATM berbasis *magnetic stripe* mudah dibaca dan dicuri pihak tak bertanggung jawab. Selain itu, kartu ATM berbasis *magnetic stripes* mudah digandakan karena data nomor kartu, *expire date*, nama nasabah, dan lainnya disimpan pada *magnetic stripes*. Terminal dan bank *host* pun tidak dapat memastikan keaslian kartu yang digunakan saat transaksi.

Adapun, kartu *chip* tidak mudah digandakan sebab data yang disimpan bisa lebih banyak. Hal tersebut karena *chip* memiliki *Central Processing Unit* (CPU), *memory*, sistem operasi, aplikasi, dan fungsi kriptografi. Keaslian kartu juga dapat dipastikan dengan metode

offline Content-Addressable Memory (CAM) dan *online CAM*.

Dari segi fisik, kartu ATM berbasis *magnetic stripes* memiliki pola garis hitam memanjang pada bagian belakang kartu yang berfungsi menyimpan data dan akan terbaca ketika melakukan transaksi. Garis hitam itu mengirimkan data ke EDC melalui gesekan magnetik, sehingga ketika pita hitam rusak kartu akan sulit terbaca.

Sementara itu, kartu ATM berbasis *chip* memiliki kepingan kecil emas di bagian kiri depan kartu. Jika dibandingkan dengan kartu ATM *magnetic stripe*, fisik kartu berbasis *chip* jauh lebih kuat. Hal tersebut tak lepas dari teknologi *chip* yang memiliki CPU dan memori yang tertanam dalam kartu sehingga memberi perlindungan lebih kuat. ●



Pentingnya Mempersiapkan Dana Pensiun sejak Dini

Dana pensiun menjadi hal yang penting untuk disiapkan sejak muda agar tidak menjadi beban di masa tua, juga sebagai upaya untuk memutus rantai generasi *sandwich*.

Terjadinya krisis pandemi Covid-19 pun membuat semakin banyak orang melek akan perencanaan keuangan, termasuk dana pensiun.

Berdasarkan riset Investor Global Schroders 2021, pandemi Covid-19 berdampak besar pada keputusan pensiun masyarakat global.

Riset tersebut dilakukan pada responden yang menginvestasikan paling sedikit €10.000 atau setara dengan Rp163 juta dalam setahun ke depan.

Hasilnya, lebih dari tiga per empat masyarakat menyatakan akan mengalokasikan dana yang lebih banyak untuk masa tuanya.

Hasil riset pun menunjukkan sebanyak 73% responden menyatakan ingin pensiun lebih

cepat. Di Indonesia, sebanyak 37% orang memikirkan untuk pensiun lebih dini dari rencana awal.

Mengapa mempersiapkan dana pensiun penting? Secara sederhana, masa pensiun merupakan suatu periode waktu dimana seseorang telah memasuki masa telah berhenti bekerja.

Artinya, kita tidak lagi memiliki penghasilan dari pekerjaan kita atau pendapatan yang didapatkan jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan saat kita di usia produktif.

Dengan menyiapkan dana pensiun, kita akan mampu mencapai masa pensiun yang lebih sejahtera. Cukup atau tidaknya dana pensiun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Lebih lanjut, mempersiapkan dana pensiun juga dapat menghindarkan kita dari jebakan generasi *sandwich*. Dana pensiun pun dapat dijadikan sebagai modal usaha nantinya jika kita tetap ingin bekerja di masa tua.

Pada umumnya, masyarakat Indonesia memasuki masa pensiun pada kisaran usia 55 hingga 60 tahun. Besaran dana pensiun juga harus mempertimbangkan seluruh pengeluaran selama sisa usia.

Beberapa tips yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan dana pensiun, yaitu *pertama*, tentukan berapa jumlah dana yang dibutuhkan. Dana ini pun berbeda pada setiap individu, tergantung pada kebutuhan dan gaya hidup.

Kedua, mulailah menabung dan berinvestasi. Disarankan untuk membuat tabungan khusus untuk dana pensiun.

Ketiga, tentukan instrumen investasi. Beberapa instrumen investasi yang bisa menjadi pilihan, misalnya emas, saham, reksa dana, deposito, maupun instrumen lainnya. Investasi dapat dilakukan dengan mencicil setiap bulannya.

Persiapan dana pensiun pun perlu memikirkan strategi investasi, sehingga imbal hasil yang didapat setiap tahun bisa mengimbangi tingkat inflasi. ●

TAHUKAH
ANDA ?

ESG dan Indeks SRI KEHATI: Alternatif Indikator Investasi yang Ramah Lingkungan

Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik atau *Environment, Social, and Good Corporate Governance* (ESG) menjadi salah satu tolok ukur utama investor sebelum memutuskan berinvestasi.

Perbankan bahkan telah memasukkan pertimbangan ESG sebelum memberikan kredit kepada debitur. Hal itu sesuai dengan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Investor di pasar modal juga mulai bergerak melaksanakan investasi yang berkelanjutan karena dinilai memiliki risiko yang lebih terukur dan terjaga.

Walaupun faktor ESG yang kuat di dalam suatu perusahaan belum tentu mencerminkan kinerja yang baik, tetapi setidaknya perusahaan tersebut sudah mendapat persepsi positif dari pemodal.

Untuk memudahkan para investor memilih saham yang telah sesuai dengan kriteria ESG, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menawarkan indeks SRI-KEHATI. Nama indeks ini diambil dari akronim *Sustainable Responsible Investment* (SRI) dan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG.

Indeks hasil kerja sama antara BEI dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yang diluncurkan pada 8 Juni 2009 ini menjadi salah satu tolok ukur performa saham yang berbasis ESG.

Saat ini, indeks SRI-KEHATI memiliki konstituen sebanyak 25 saham. Konstituen indeks SRI-KEHATI selalu ditinjau ulang dan diperbarui pada Mei dan November setiap tahun. Saham-saham yang masuk ke dalam indeks SRI-KEHATI dipilih dengan cermat dalam 3 tahap.

Seleksi pertama dilakukan terhadap bisnis inti dengan daftar negatif a.l. pestisida, nuklir, persenjataan, tembakau, alkohol, pornografi, perjudian, *Genetically Modified Organism* (GMO), dan pertambangan batu bara.

Selanjutnya seleksi kedua dilakukan terhadap aspek keuangan dengan rasio keuangan dan indikator pasar a.l. kapitalisasi pasar minimal Rp1 triliun, total aset minimal Rp1 triliun, rasio *free float* lebih dari 10%, dan rasio *price/earning* (PE) positif.

Terakhir, seleksi dilakukan terhadap aspek fundamental yaitu lingkungan, keterlibatan masyarakat, tata kelola perusahaan, perilaku bisnis, ketenagakerjaan, dan Hak Asasi Manusia.

Adapun, Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso memaparkan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019 turut meningkatkan kesadaran investor akan pentingnya ESG dalam rangka investasi berkelanjutan.

“Saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan peringkat ESG lebih tinggi pada umumnya memiliki performa lebih baik,” kata Wimboh.

Berdasarkan data BEI per 26 November 2021, indeks SRI-KEHATI tumbuh 0,40% sejak awal tahun. Saat ini beberapa saham yang termasuk ke dalam indeks SRI-KEHATI adalah kode saham ASII, AUTO, BBKA, BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, BSDE, DSNG, INCO, INDF, JSMR, KLBF, LSIP, NISP, PGAS, POWR, PTPP, SIDO, SMGR, TINS, TLKM, UNTR, UNVR, dan WIKA. ●



Waspada Modus Transaksi Kejahatan melalui *e-Wallet* (Dompet Elektronik)

Transaksi keuangan secara digital mengalami peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di masa pandemi Covid-19 yang menghambat mobilitas masyarakat.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, lonjakan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, yang juga didukung oleh perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital.

BI mencatat, nilai transaksi pada uang elektronik (UE) tumbuh sebesar 55,54% secara tahunan (*year-on-year/yoy*), mencapai Rp29,23 triliun pada Oktober 2021. Pada saat yang sama, transaksi *digital banking* pun meningkat hingga 63,31% *yoy* menjadi Rp3.910,25 triliun.

Di samping itu, lonjakan transaksi digital tercermin dari transaksi pada *platform e-commerce*. Perry memperkirakan, transaksi *e-commerce* pada tahun ini akan mencapai Rp403 triliun. Sementara pada 2022, transaksi *e-commerce* diperkirakan meningkat sebesar

25,24% menjadi sebesar Rp530 triliun.

“Transaksi ekonomi dan keuangan digital tumbuh sangat tinggi, didukung dengan meningkatnya minat masyarakat untuk belanja *online*,” katanya.

Transaksi digital yang signifikan pun terlihat dari kinerja layanan dompet elektronik (*e-wallet*) di Indonesia. DANA misalnya, melaporkan terjadi lonjakan pada aktivitas pengiriman uang di aplikasi tersebut pada Oktober 2021, yaitu sebesar 328% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pada saat yang sama, peningkatan signifikan juga tercatat pada aktivitas transaksi QRIS yang mencapai 267%, pembelian pulsa ponsel 141%, pembayaran tagihan 159%, dan *online commerce* 39,9%.

Tak heran transaksi keuangan digital, terutama *e-wallet*, mengalami peningkatan yang sangat tinggi mengingat akan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan yang ditawarkan saat bertransaksi.

Namun demikian, kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh

e-wallet tak luput dari kejahatan siber. Oleh karena itu, pengguna *e-wallet* disarankan untuk tetap berhati-hati dan waspada saat melakukan transaksi atau menggunakan alat pembayaran tersebut.

Berikut beberapa tips agar tetap aman dalam bertransaksi menggunakan *e-wallet*:

- Gunakan *e-wallet* yang aman. Saat ini banyak perusahaan yang telah menerbitkan *e-wallet*. Pilihlah *e-wallet* dari perusahaan yang resmi dan memiliki *track record* baik.
- Gunakan *password* yang aman. Dalam pemilihan *password*, hindari tanggal lahir, nomor telepon, dan angka berurutan. Perlu diingat, jangan menyimpan informasi penting, seperti *password* di dalam *smartphone*. Kemudian, ganti *password* secara berkala dan sebisa mungkin menggunakan *password* yang berbeda dengan *e-wallet* atau alat pembayaran lainnya.
- Rahasiakan OTP. *One time password* atau OTP tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Kode ini biasanya terdiri dari kombinasi angka yang aktif dalam jangka waktu tertentu. Karena sangat penting, pengguna *e-wallet* disarankan untuk menjaga kerahasiaan OTP.
- Rutin mengecek aplikasi. Untuk menjaga keamanan, pengecekan saldo dan riwayat transaksi perlu dilakukan secara berkala. Hal ini disarankan agar jika terjadi transaksi yang tidak dilakukan, anda dapat langsung menghubungi *call center* dompet elektronik yang digunakan. ●





Resolusi Finansial 2022: Atur Keuangan Lebih Baik



Tahun 2021 segera berakhir dan segera masuk tahun 2022. Seringkali seseorang menyambut tahun baru dengan menyusun resolusi.

Tidak hanya soal kehidupan dan karier, tetapi juga menyangkut aspek finansial. Resolusi keuangan dibutuhkan untuk mencapai kebebasan finansial, terutama di tengah ketidakpastian saat ini akibat pandemi Covid-19 yang belum selesai.

Dikutip dari laman sikapiuangmu.ojk.go.id, resolusi keuangan bisa bervariasi antar individu seperti mengurangi utang, menambah kekayaan, atau agar lebih bisa menabung dari penghasilan sendiri.

Apapun resolusi keuangannya, satu hal yang sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu adalah rencana keuangan. Rencana keuangan adalah suatu panduan bagi seseorang dalam menentukan arah dan strategi untuk mencapai impian yang diinginkan.

Rencana keuangan yang baik terdiri dari tujuan keuangan, jangka waktu untuk mencapai tujuan, serta bagaimana strategi untuk mencapainya.

Dalam memulai tahun 2022, Anda mungkin dapat memilih resolusi keuangan yang tepat. Beragam jenis rencana dapat dipilih. Berikut ini beberapa tips resolusi keuangan yang bisa disiapkan untuk kehidupan finansial yang lebih baik pada tahun depan, dilansir dari US News:

1. Merencanakan Anggaran

Penasihat investasi sekaligus pendiri dan CEO SIS Financial Group di Hoffman Estates, Illinois, Cynthia Pruemm menyebutkan bahwa kesuksesan finansial sepanjang tahun ditentukan pada rencana keuangan yang telah disusun. Untuk itu, salah satu resolusi keuangan penting untuk tahun 2022 adalah menyusun rencana keuangan.

Bagian dari proses ini adalah melakukan analisis keuangan atas pendapatan, pengeluaran, dan investasi. Untuk membantu merencanakan anggaran, Anda dapat memanfaatkan situs maupun aplikasi keuangan yang sudah banyak tersedia.





2. Menabung Setiap Bulan

Pruemm menyarankan untuk menabung setiap bulan berapapun jumlahnya, baik dalam dana darurat maupun rekening tabungan. Bahkan, uang receh pada setiap transaksi kartu debit atau kartu kredit bisa disisihkan ke rekening tabungan terpisah. “Anda akan terkejut betapa cepatnya semua uang receh itu bisa bertambah,” ujar Pruemm.



3. Menyiapkan Dana Pensiun

Penasihat investasi dan pendiri Stivers Financial Services di Knoxville, Tennessee, Brian Stivers menyarankan untuk menyisihkan dana ke rekening tabungan atau dana darurat sebelum membayar pengeluaran lainnya.

“Saya sarankan Anda menetapkan tujuan menyisihkan 10% dari penghasilan Anda setiap bulan untuk kebutuhan masa depan seperti dana pensiun,” katanya.

4. Mulai berinvestasi

Berinvestasi bisa berjalan seiring dengan resolusi menyiapkan dana untuk masa pensiun. Saat ini ada banyak panduan investasi yang tersedia untuk membangun portofolio bagi investor pemula.

Hunter menyarankan untuk berinvestasi dengan pola pikir jangka panjang. “Tetapkan rencana bulanan untuk investasi dan patuhi itu, terlepas dari apa yang terjadi di pasar,” kata John Hunter, Direktur Program MBA dan profesor praktik di Le Moyne College di Syracuse, New York.



5. Evaluasi pilihan asuransi Anda

Apakah Anda memiliki asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi lainnya? Analisis kembali produk asuransi yang Anda gunakan.

Siyu Wang, seorang ekonom perilaku di Institute for the Study of Economic Growth di Wichita State University, menilai pentingnya mempertimbangkan kembali pilihan asuransi Anda di awal setiap tahun, begitu pula di awal tahun 2022.

Selain mengevaluasi pilihan asuransi kesehatan Anda, cek lagi asuransi rumah dan asuransi kendaraan yang Anda miliki. Mungkin Anda membayar terlalu besar atau bahkan ingin membeli beberapa asuransi.

“Apakah Anda dan keluarga Anda memiliki asuransi jiwa? Apakah penerima manfaat sudah diatur dengan tepat? Skenario ini mungkin tampak jauh, tetapi selalu lebih baik dipersiapkan,” ujar Wang.

6. Bayar Utang

Coba mulai membuat rencana untuk mengurangi utang, terutama jika Anda berusia 30 tahun atau lebih tua dengan jumlah utang yang besar. Resolusi melunasi utang sangat penting, bahkan jika kita harus menggunakan dana tabungan.

Ganesh Pandit, seorang profesor akuntansi di Sekolah Bisnis Robert B. Willumstad di Universitas Adelphi di New York, menyatakan jika Anda tidak dapat mengurangi utang Anda menjadi nol, maka cobalah untuk meminimalkan saldonya.

“Untuk menikmati kebebasan finansial Anda, penting bagi Anda untuk memiliki kendali atas berapa banyak utang yang dimiliki, tidak peduli apa tujuan dari utang itu,” katanya. ●



Bulan Inklusi Keuangan 2021 Hadir Kembali, Kejar Target Inklusi Keuangan 2024

OJK bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan kembali melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) pada Oktober 2021 dengan mengusung tema “*Inklusi Keuangan untuk Semua, Bangkitkan Ekonomi Bangsa*”.

Kegiatan BIK 2021 digelar dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai bentuk upaya untuk membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat di Indonesia serta sebagai bentuk kampanye budaya menabung pada berbagai sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan BIK 2021 juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan, sehingga dapat mendorong penggunaan oleh masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut.

Selama satu bulan penuh pelaksanaan BIK 2021 telah dilakukan 2.183 kegiatan di seluruh Indonesia dengan total peserta sebanyak 1.348.488 orang, mencakup kegiatan sosialisasi tatap muka maupun virtual (webinar), pembukaan rekening, penyaluran kredit/pembiayaan mikro, *business matching*, pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta publikasi program literasi dan inklusi keuangan secara masif.

Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, terdapat pembukaan



rekening bank baru sebanyak 2.008.165 rekening dan penyaluran kredit/pembiayaan kepada 168.370 debitur. Selain itu, tercatat 93.683 pembukaan polis asuransi, 330.000 rekening efek baru, 633.142 debitur perusahaan pembiayaan, 15.168 rekening sektor pergadaian, dan 58.452 akun di sektor *fintech*.

Sebagai rangkaian BIK, pada 18 Oktober hingga 2 November 2021, diselenggarakan kegiatan virtual Financial Expo (FinExpo) BIK 2021 yang diinisiasi oleh Lembaga Jasa Keuangan dan dapat diakses melalui portal www.finexpo-bik2021.id. Sampai dengan berakhirnya kegiatan BIK 2021, portal FinExpo BIK telah dikunjungi oleh sebanyak 90.353 pengunjung.

Rangkaian kegiatan lainnya dari BIK 2021 yaitu *iB Vaganza* yang dilaksanakan berkolaborasi dengan industri perbankan syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli

Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Sebagai bentuk apresiasi dan sebagai rangkaian kegiatan BIK 2021, dilakukan penyerahan SimPel Award 2021 kepada bank peserta Simpanan Pelajar (SimPel/Simpel iB), sekolah, individu, dan wilayah yang berpartisipasi aktif serta berkontribusi memberikan dampak positif dalam mendukung implementasi program SimPel/Simpel iB bagi seluruh pelajar di Indonesia.

Selain itu, disampaikan juga pengumuman pemenang Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) serta pengumuman *best booth* FinExpo BIK 2021.

Melalui BIK 2021 diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi Kementerian/Lembaga dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendukung Program PEN serta pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada akhir 2024. ●



Kolaborasi dengan OECD, OJK Selenggarakan Seminar Internasional Pengembangan Literasi Keuangan Digital



OJK bersama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyelenggarakan seminar internasional pada 2-3 Desember 2021 yang mengangkat tema “*Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in Asia and the Pacific*”.

Seminar tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif secara global, regional maupun domestik mengenai kebijakan dan penerapan program literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen di kawasan Asia-Pasifik.

Penyelenggaraan seminar yang dilaksanakan secara *hybrid* di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski ini merupakan rangkaian kegiatan Satu Dasawarsa OJK dan bagian dari persiapan Indonesia di Presidensi G20 tahun 2022.

Kegiatan seminar internasional tersebut antara lain dihadiri oleh 3 *keynote speakers* dan 13 panelis.

Selain itu, peserta diikuti oleh delegasi dan para ahli dari OECD International Network on Financial Education (INFE), anggota dari G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection, perwakilan dari Global Partnership on Financial Inclusion (GPFI), anggota International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet), serta perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, World Bank, pejabat pemerintahan, organisasi internasional, akedemisi, sektor swasta dan LSM.

“Ke depan, mengingat sifat transaksi keuangan digital yang canggih, OJK akan terus meningkatkan literasi digital masyarakat,” kata Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso dalam sambutannya.

Wimboh menambahkan, peningkatan literasi keuangan digital sangat diperlukan antara lain agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam penawaran pinjaman *online* ilegal dan bisa memanfaatkan *fintech lending* atau *platform* keuangan digital lain yang terdaftar di OJK ataupun regulator lain.

Adapun, OECD merupakan organisasi internasional yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Salah satu inisiatif dari OECD tersebut adalah melakukan riset serta survei secara berkala kepada beberapa negara untuk kemudian dipromosikan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Selain itu, OECD mengalihkan beberapa fokus risetnya untuk melihat dampak dari disrupsi pandemi terhadap industri keuangan, perlindungan konsumen, serta literasi keuangan. OECD juga melaporkan beberapa perkembangan dari digitalisasi yang sedang berkembang pesat dan kebijakan yang diimplementasikan di berbagai negara dalam menghadapi pandemi.

Dengan terselenggaranya seminar ini, diharapkan diperoleh berbagai masukan, strategi, *best-practices* dari berbagai ahli di berbagai negara kawasan Asia-Pasifik yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat kebijakan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen untuk meningkatkan ketahanan keuangan masyarakat di Indonesia. ●



Ikut Percepat Pemulihan Ekonomi, OJK Gelar Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021

OJK bersama Pemerintah dan Industri Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat yang diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2021 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Kamis (16/12/2021) mengatakan saat ini masih terdapat kesenjangan inklusi keuangan di wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu sebesar 83% dan 68%.

“Atas dasar hal tersebut, percepatan akses keuangan di daerah menjadi sangat penting



dan perlu diperhatikan agar dapat menjangkau ke seluruh daerah,” kata Wimboh.

Menurut Wimboh, keberadaan TPAKD juga sangat penting dalam menyerap program-program yang dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong kemajuan UMKM.

Melalui TPAKD ini, OJK juga mendorong adanya inovasi-inovasi pembiayaan sektor usaha masyarakat di daerah seperti pinjaman melawan rentenir ataupun pengembangan KUR klaster lainnya.

“Kalau ada KUR klaster yang belum terlayani pembiayaan serta pengembangannya, bisa disampaikan ke OJK. Kalau ada masyarakat yang alami kesulitan akses pembiayaan tolong beritahu kami. Kami selalu berupaya membantu kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ke depan, OJK dan TPAKD akan terus mengembangkan program digitalisasi bagi UMKM mulai dari pembiayaan, pembinaan, promosi dan penjualan untuk semakin mempercepat kemajuan UMKM.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara dalam sambutannya menyampaikan bahwa sampai dengan Desember 2021, telah terbentuk 325 TPAKD di 34 provinsi dan 291 kabupaten/kota.

Khusus untuk program KUR klaster, OJK bersama TPAKD telah

membentuk ekosistem KUR klaster di beberapa daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan berorientasi ekspor, diantaranya klaster alpukat Pamelang di Malang, klaster padi di Karanganyar, klaster umbi porang di Mojokerto, klaster padi, jagung dan peternakan sapi di Gorontalo, dan klaster serih wangi di Minahasa, Sulut.

Selama tahun 2021, untuk mendukung operasionalisasi TPAKD, telah dikeluarkan pula Buku Petunjuk Teknis (Juknis) Pembentukan TPAKD, serta Juknis Penyusunan Program Kerja TPAKD. Selain itu, telah dikeluarkan pula *Generic Model Skema Kredit/ Pembiayaan Sektor Prioritas (K/ PSP) Pertanian* untuk mendukung terciptanya ekosistem pembiayaan yang inklusif di sektor pertanian.

Tirta menjelaskan, berbagai program kerja pada 2022 telah disiapkan untuk semakin memperluas akses keuangan masyarakat seperti program kerja Akselerasi Pemanfaatan Produk/ Layanan Keuangan Digital dan implementasi *Business Matching* dengan tematik. Mendorong sektor ekonomi unggulan daerah dan penguatan ekosistem keuangan digital.

Dalam Rakornas TPAKD 2021 ini dilakukan pula penyerahan TPAKD Awards 2021 kepada lima TPAKD tingkat provinsi dan tujuh TPAKD tingkat kabupaten/kota yang dinilai telah berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah. ●



Inovasi Literasi dan Edukasi Keuangan Digital melalui LMS



Jakarta, 20 Desember 2021. Otoritas Jasa Keuangan secara resmi meluncurkan infrastruktur literasi keuangan di tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia meliputi *Learning Management System (LMS)*, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025, dan Buku Saku Literasi Keuangan bagi Calon Pengantin.

Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat luas, OJK berinisiatif untuk menerapkan pembelajaran materi literasi keuangan yang bersifat *Massive Open Online Course (MOOC)* atau pembelajaran massal secara *online* dalam periode waktu tertentu yang dapat diakses dari mana saja, melalui pengembangan LMSKU.

LMS merupakan suatu sistem pembelajaran dan pelatihan yang mandiri dan terintegrasi terkait edukasi dan literasi keuangan.

Pengembangan LMS dilakukan supaya seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses media pembelajaran edukasi keuangan

melalui komputer desktop dan laptop secara *real time*, di mana pun, dan kapan pun.

LMS dirancang untuk dapat menampilkan visualisasi materi secara menarik yang dilengkapi dengan evaluasi proses pembelajaran berupa kuis untuk mengukur tingkat pemahaman dan literasi keuangan peserta.

Sistem LMS dibutuhkan untuk meningkatkan kemudahan dalam pembelajaran dan pelatihan materi literasi keuangan yang lebih lengkap, kredibel, *user friendly*, dan interaktif.

LMS sebagai media pembelajaran memiliki tujuan yaitu:

- Memudahkan kegiatan belajar dan pelatihan materi literasi keuangan;
- Perluasan jangkauan program edukasi keuangan serta penyebaran informasi keuangan OJK kepada konsumen maupun masyarakat secara efektif dan efisien;
- Mempercepat proses pembelajaran terkait materi literasi keuangan;
- Menyediakan materi edukasi keuangan yang komprehensif

dan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masyarakat;

- Menjadi pusat media pembelajaran dan pelatihan terkait materi edukasi keuangan yang kredibel dan *up to date* serta mudah diakses masyarakat di berbagai daerah.

Target LMS yaitu seluruh kelompok masyarakat dengan prioritas sesuai target Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia agar dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan materi literasi keuangan secara berkesinambungan.

LMSKU terbagi menjadi 3 tingkatan level, yaitu *basic*, *intermediate*, dan *advanced* dan masing masing level terdiri dari sepuluh modul yaitu Pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal, Perencanaan Keuangan, Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, dan *Fintech* Pendanaan Bersama dan *Digital Financial Literacy*. Adapun, LMS dapat diakses melalui lmsku.ojk.go.id ●

Otoritas Jasa Keuangan

Mengucapkan:

Selamat
Natal



dan

Tahun Baru 2022

